

**Penyusunan dan penghitungan indeks pembangunan daerah  
Sebagai tolok ukur kemajuan daerah  
(studi kasus wilayah subosuka wonosraten propinsi jawa tengah)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

**Arif Rahman Hakim**

**F0101019**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2005**

**ABSTRAK**  
**PENYUSUNAN DAN PENGHITUNGAN**  
**INDEKS PEMBANGUNAN DAERAH**  
**SEBAGAI TOLOK UKUR KEMAJUAN DAERAH**  
**(Studi Kasus Wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah)**  
**Arif Rahman Hakim**  
**F0101019**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyusun dan menghasilkan suatu dokumen yang memuat indeks-indeks pembangunan daerah di setiap kecamatan di Kabupaten/Kota di wilayah Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan di 124 Kecamatan di Kabupaten/Kota di wilayah Subosuka Wonosraten yang meliputi 1 (satu) Kota dan 6 (enam) Kabupaten. yaitu, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan data primer dari instansi-instansi yang terkait dengan indikator-indikator yang berkaitan dengan penentuan Indeks Pembangunan Daerah selama periode waktu 2001, 2002 dan 2003. Alat analisis yang digunakan adalah mengadopsi model yang telah dikembangkan oleh Bappenas. Perhitungan bobot kriteria dan sub kriteria tidak dilakukan dengan penelitian secara tersendiri, namun mengadopsi dan menggunakan hasil studi yang telah dilakukan Bappenas, meliputi 3 (tiga) indikator global besar yaitu : Kriteria Kapabilitas Pemerintah, Kriteria perkembangan Wilayah, dan Kriteria Keberdayaan Masyarakat yang di dalamnya memuat rasio-rasio dari ketiga Indikator penentu Indeks Pembangunan Daerah. Sebagai alat perbandingan dilakukan uji F statistic (variance) untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan mengenai indeks Pembangunan daerah pada setiap Kecamatan di Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) tahun maupun perbedaan antar Kabupaten/Kota serta perbedaan nilai IPD selama periode waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Subosuka Wonosraten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan IPD, menunjukkan kecamatan-kecamatan yang yang menjadi ibu kota Kabupaten/Kota selalu mempunyai nilai IPD yang tertinggi, disusul kemudian kecamatan-kecamatan yang letaknya tidak jauh dari kota. Kategori nilai IPD di setiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah kecamatan dengan kategori IPD tinggi jumlahnya masih sedikit, dan kebanyakan berkategori sedang serta sedikit yang berkategori rendah. Hasil uji F terhadap setiap Kecamatan di setiap Kabupaten/Kota di wilayah Subosuka Wonosraten menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terhadap nilai IPD di Kota Surakarta tidak terbukti, Kabupaten Boyolali tidak terbukti, Kabupaten Sukoharjo terbukti, Kabupaten Karanganyar terbukti, Kabupaten Wonogiri terbukti, Kabupaten Sragen tidak terbukti dan Kabupaten Klaten tidak terbukti. Pengujian terhadap rata-rata nilai IPD di terhadap Kabupaten/Kota menunjukkan adanya perbedaan, sedangkan pengujian terhadap perbedaan rata-rata nilai IPD Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten selama 3 (tiga) tahun tidak terbukti.

Penelitian ini dapat disarankan beberapa hal, yaitu pertama, hasil perhitungan IPD dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan di dalam mengelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Kedua, Hasil perhitungan IPD dapat dijadikan evaluasi atas kinerja pembangunan di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk

pereanaan di masa-masa mendatang. ketiga, melihat berbagai indikator data yang digunakan dalam penyusunan indeks ini, maka daerah/wilayah/kecamatan hendaknya memperbaiki basis data yang selama ini dimiliki, selanjutnya mengevaluasi tingkat keakuratan datanya sekaligus mengembangkan data.

Kata kunci : Indeks Pembangunan Daerah, kemajuan pembangunan daerah, Subosuka Wonosraten



### **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dosen penguji skripsi

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

Surakarta, 8 Agustus 2005

Dosen Pembimbing,

Sumardi, SE.  
NIP. 131 658 544

### **HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disetujui dengan baik oleh Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Agustus 2005

Dewan Penguji Skripsi

1. Drs.Mulyanto, ME. (.....)  
NIP. 132 046 019 Ketua
2. Sumardi, SE (.....)  
NIP. 131 658 544 Pembimbing
3. Drs. Hari Murti, MEP. (.....)  
NIP. 131 409 791 Anggota

**MOTTO**

*“ .....Allah tidak akan menguji hamba-Nya diluar batas kemampuan mereka.....” (QS. 2 : 286)*

Kemenangan selalu mengiringi kesabaran  
Jalan keluar selalu mengiringi cobaan  
Kemudahan selalu mengiringi kesusahan  
(H.R Tirmidzi)

**Sedaya Tumindak Adamel remening Ngasanes  
Ojo Rumongso Bisoo, Nanging Bisoo Rumongso  
Tanmingkuh Saliring Kewuh  
Ojo Waton Muni, Nanging muni kang Nganggo Waton  
Ojo Dumeh  
(Mbah Kakung)**

Mulailah dari diri sendiri  
Mulailah dari yang kecil  
Mulailah sekarang juga  
(Aa' Gym)

Kemarin adalah Kenangan  
Hari ini adalah Kenyataan  
Dan esok adalah harapan  
(Aa' Kim)

### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil 'Aalamiin  
**Kado Kecil ini penulis persembahkan untuk:**

Allah SWT yang telah memberikan Nikmat Waktu dan Kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan amanah ini..

Orang Tuaku, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan selalu mendoakanku di setiap sholat malamnya semoga "Buah Kasihmu" ini selalu menjadi seorang anak yang Sholeh..Amiin..  
Adekku yang paling ngangeni dan sok ngayelke, De Nizar dan De Ma'ruf semoga kita tetep bisa rukun terus ya dek...  
Almamaterku UNS tempatku menuntu Ilmu..

### Katur Ugi:

Keluarga Ageng Nasyid MUMTAZ Pakde Samboga, Kang Mul, Kang Hudi, si To Rio, bersama kalian serasa jadi "TOMBO ATI" ...kapan latian lagi..

**Rekan-rekan seperjuangan 2001 Mbakyu Asti, Ima, Udin, Abi, Imbang, Rois, Wahyu, Pitrek, Yuli, Maysun, Fany, Tanti, Enjang, Rahma, Lili, Yanti, Santi and semuanya yang ga bisa kim-kim sebutin satu-satu afwan ya...Syukron very maaaahhh...**

Sohib-sohibku bekas Presidium HMJ EP Mas Ling eh Akh Ikhsan no kok.. matur syukron ya.. sampun ngrencangi kawula (kapan ke HICK GAUL maleh...??), temen boncenganku Hudi makasih boss..tuk smua masukane, Bu Lyra syukron jiddan kagem sedayanipun..De Yaya matur nuwun buat persahabatannya, Jeng Ana makasih atas smuanya, matur nuwun Mas Kus "Ecek", Ampun "Ngojek" teyusss..lan kagem sedaya kemawon ingkang sampun ngrencangi lan dukung kawula..

**Ade-adekoe di HMJ: Adimas Jay (sing sabar dadi ketua, ojo lali sholate), De Nurul "Rully", De Lina, De Ucik, Mas Nusa, Andhy, lan Denny ayooo... pada semangat... ade-ade Geng Surya yg imut2 (De Nita, Yuna, Lita, Tia dan Diah) tetep rukun ya... anak anak bekas bid 2 Pita, Dupi, Adi, Hari, Chandra, Erni.. Maafkanlaahh kabadmu ini.. and semuanya pengurus, di tangan kalianlah.. jadikan HMJ EP lebih maju..**

**Kesebelasan PIMNAS UNS Padang 2005 Pakde Ikhsan, "Ingsune" Zaki, Ali "Asosiasi", Nashirudin, Nurullita, Tyasing Ati, Lian, Sigit, Cmoool, Hudi, seminggu bersama kalian serasa 7 hari yang tak kan pernah terlupakan...**

Dan

Kaping Pungkasan Khususon Katur

**"Aisyah" Adinda Kita**

Teman Sejati yang selama ini belum ku temui..

**KATA PENGANTAR**

Tiada kata yang lebih indah untuk diucapkan selain ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT Dzat yang mengatur setiap desah nafas setiap makhluk di bumi ini. Betapa tidak, atas limpahan nikmat dan kemurahan-Nya skripsi yang berjudul "Penyusunan dan Penghitungan Indeks Pembangunan Daerah Sebagai Tolok Ukur Kemajuan Daerah : Studi Kasus Wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah" dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada segenap pihak antara lain:

1. Sumardi, SE; selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan kemudahan dalam memberikan bimbingan dan maafkan saya kalau telah merepotkan Bapak.
2. Dra. Salamah Wahyuni, SU; selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret yang memberikan kemudahan ijin penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini.
3. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, MSi dan Drs. BRM. Bambang Irawan, MSi; selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada saya.
4. Bapak dan Ibu yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran membimbing dan mendoakan dalam berjalannya proses pendewasaan ini.
5. Seluruh dosen, khususnya Dosen Jurusan Ekonomi pembangunan yang telah membekali ilmu pengetahuan dan mendukung selama masa perkuliahan.
6. Segenap pihak Instansi dan Dinas-dinas di Wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dengan penuh kesabaran dan keramahannya.
7. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang terbaik.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi ini disusun dan penulis sadar masih banyak kekurangan di dalamnya. Demi sempurnanya sebuah cita-cita, maka segala keterbatasan dan



kekurangan tersebut perlu senantiasa diperbaiki, oleh karenanya saran, ide, dan kritik yang membangun dari semua pihak tetap penulis harapkan

Semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan memberikan kontribusi serta masukan untuk pembangunan daerah di wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN serta bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini.

Surakarta, 8 Agustus 2005

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	9
	C. Tujuan Penelitian.....	10
	D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA .....	12
	A. Landasan Tori .....	12
	1. Paradigma Pembangunan .....	12
	2. Pembangunan Daerah .....	14
	3. Indikkator-indikator Pembangunan Daerah.....	16
	4. Otonomi Daerah.....	24
	B. Hasil Penelitian Sebelumnya	26
	C. Kerangka Pemikiran	30
	D. Hipotesis Penelitian	32
BAB III	METODE PENELITIAN .....	33
	A. Ruang Lingkup Penelitian .....	33
	B. Jenis dan Sumber Data .....	33
	C. Pengukuran Variabel .....	34
	D. Teknik dan Model Analisis Data .....	35
BAB IV	HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	46
	A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	46
	1. Kota Surakarta.....	51
	2. Kabupaten Boyolali .....	55
	3. Kabupaten Sukoharjo.....	60

4. Kabupaten Karanganyar.....	63
5. Kabupaten Wonogiri .....	67
6. Kabupaten Sragen .....	72
7. Kabupaten Klaten.....	76
B. Hasil Analisis.....	84
1. Indeks Pembangunan Daerah Setiap kecamatan di Kabupaten/Kota di Wilayah Subosuka Wonosraten 2001-2003.....	82
a. Kota Surakarta.....	84
b. Kabupaten Boyolali .....	87
c. Kabupaten Sukoharjo.....	91
d. Kabupaten Karanganyar.....	96
e. Kabupaten Wonogiri .....	100
f. Kabupaten Sragen .....	105
g. Kabupaten Klaten.....	110
2. Perbandingan Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Subosuka Wonosraten tahun 2001-2003.....	115
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN Tahun 2003 .....	7
Tabel 1.2. Pembagian Wilayah Administrasi di Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2002.....	8
Tabel 2.1. Indeks Pembangunan Daerah, Menurut Propinsi di Indonesia Tahun 1994, 1996, dan 1998.....	28
Tabel 2.2 Indeks Pembangunan Daerah, Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2000, 2001, dan 2002.....	29
Tabel 4.1. Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Propinsi	51

	Jawa Tengah .....	
Tabel 4.2.	Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kota Surakarta.....	52
Tabel 4.3	Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2003.....	53
Tabel 4. 4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kota Surakarta Tahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah.....	55
Tabel 4.5.	Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Boyolali.....	56
Tabel 4.6.	Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2003.....	57
Tabel 4.7	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Boyolali Tahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah.....	59
Tabel 4.8.	Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Sukoharjo.....	60
Tabel 4.9.	Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk KAbuapten Sukoharjo Tahun 2003.....	61
Tabel 4.10.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten SukoharjoTahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah.....	63
Tabel 4.11.	Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Karanganyar.....	64

Tabel 4.12.	Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2003.....	65
Tabel 4.13.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten KarangnayarTahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah.....	66
Tabel 4.14.	Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Wonogiri.....	68
Tabel 4.15.	Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2003.....	69
Tabel 4.16.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Wonogiri Tahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah.....	71
Tabel 4.17.	Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Sragen.....	72
Tabel 4.18.	Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2003.....	73
Tabel 4.19.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Sragen Tahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah.....	75
Tabel 4.20.	Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Klaten.....	78
Tabel 4.21.	Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2003.....	79
Tabel 4.22	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun	

	1993 Kabupaten Klaten Tahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah).....	81
Tabel 4.23.	IPD Total menurut Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar .....	84
Tabel 4.24.	IPD Total menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar .....	87
Tabel 4.25.	IPD Total menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar .....	92
Tabel 4.26.	IPD Total menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar .....	96
Tabel 4.27.	IPD Total menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar .....	101
Tabel 4.28.	IPD Total menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar .....	106
Tabel 4.29.	IPD Total menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar .....	111
Tabel 4.30.	IPD Total rata-rata Kabupaten/Kota Subosuka Wonosraten Tahun 2001-2003 .....	115

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Penyusunan Indeks Pembangunan Daerah di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah..... 30
Gambar 3.1	Penentuan Kriteria dan Bobot Indeks Pembangunan Daerah..... 42
Gambar 4.1.	Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kota Surakarta tahun 2001, 2002 dan 2003..... 85
Gambar 4.2.	Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kabupaten Boyolali tahun 2001, 2002 dan 2003..... 89
Gambar 4.3.	Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2001, 2002 dan 92



	2003.....	
Gambar 4.4.	Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar tahun 2001, 2002 dan 2003.....	98
Gambar 4.5.	Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri tahun 2001, 2002 dan 2003.....	101
Gambar 4.6.	Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kabupaten Sragen tahun 2001, 2002 dan 2003.....	108
Gambar 4.7.	Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2001, 2002 dan 2003.....	113

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang ditandai dengan semangat desentralisasi kewenangan (*power sharing*) dan desentralisasi keuangan (*fiscal decentralization*) mulai dilaksanakn secara penuh sejak awal tahun 2001, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun/ 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, beserta segenap Peraturan Pemerintah dan ketentuan lain turunan dan pendukungnya. Kedua undang-undang tersebut telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah pada hakekatnya diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan (*service delivery*) Pemerintah Daerah (*local government*) kepada masyarakat (*social community*) agar lebih efisien dan responsif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di daerah masing-masing. Cara yang ditempuh yaitu dengan meningkatkan hak dan tanggung jawab Pemerintah

Daerah untuk mengelola rumah tangga sendiri, tetapi masih berada dalam koridor

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945

tepatnya pada alinea keempat pembukaannya. Dalam alinea tersebut disebutkan mengenai tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum (Kadiman,2001). Sedangkan arah dan petunjuk pelaksanaan pembangunan itu sendiri mengacu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat setiap lima tahun sekali yang kemudian dijabarkan dalam rencana-rencana pembangunan yang diperuntukkan bagi pembangunan nasional ataupun daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan daerah berarti juga keberhasilan pembangunan dalam lingkup nasional. Bentuk negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan banyak suku dengan adat istiadat yang berbeda-beda memunculkan karakteristik daerah yang berbeda-beda pula. Untuk itu diperlukan suatu konsep pembangunan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara serentak dilakukan mulai tahun 2001. Implementasi dari otonomi daerah ini berdasar pada ketetapan MPR-RI No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan TAP MPR tersebut, pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi mempunyai hak dan tanggung jawab penuh untuk mengelola daerah mereka masing-masing, meskipun masih dalam lingkup pengawasan pemerintah pusat.

Peranan pemerintah dalam inisiatif dan memajukan perekonomian serta hubungan antar sector pemerintah dan swasta tergantung pada lingkungan sosial (*social environment*), tingkat perkembangan ekonomi, keadaan politik, tersedianya privat manajemen, pengalaman-pengalaman dalam perusahaan-perusahaan negara dan efisiensi administrasi pembangunan dan lain sebagainya. Jadi peranan pemerintah dalam strategi pembangunan ekonomi tidak perlu sama di mana-mana, tetapi tergantung pada keadaan sosial dan politik setempat (Irawan dan Suparmoko,(1996) dalam Mulyanto, 2004).

Tugas pokok pemerintah adalah melakukan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), pembangunan (*development*) dan fungsi pembina jaringan bisnis (*business network*) bagi masyarakatnya. Karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan semaksimal mungkin. Adanya pemberlakuan ekonomi merupakan kesempatan bagi daerah khususnya pemerintah daerah untuk memaksimalkan fungsinya bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat daerah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Khusus mengenai DAU (Dana Alokasi Umum) pemerintah telah menggunakan suatu indeks yang dihasilkan dari serangkaian perhitungan indicator yang relevan. Saragih (2003:98-99) dalam Mulyanto (2004:2-3) mengemukakan bahwa indikator tersebut adalah indicator kebutuhan daerah, mencakup: (i) belanja daerah rata-rata, (ii) indeks penduduk, (iii) indeks luas daerah, (iv) indeks harga bangunan, (v) indeks kemiskinan relatif, dan indikatorpotensi daerah, mencakup: (i) penerimaan daerah rata-rata, (ii) indeks industri, (iii) indeks sumber daya alam, (iv) indeks sumber daya manusia.

Studi mengenai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan pengembangan dari konsep HDI (*Human Development Index*) telah dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Studi ini dilakukan untuk mengukur kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di suatu wilayah didasarkan pada: (i) indikator panjang hidup, (ii) indikator pengetahuan yang dilihat dari rata-rata tertimbang antara tingkat melek huruf orang dewasa (bobot 2/3) dan rata-rata lama tahun sekolah (bobot 1/3), serta (iii) indikator kesejahteraan ekonomi yang dilihat dari PDB/PDRBnya setelah disesuaikan dengan paritas daya beli masyarakat (PPP: *Purchasing Power Parity*) (Rowter, 1996:5-6) dalam Mulyanto (2004:3).

Publikasi pada tahun 2001 mengenai Indeks Pembangunan Daerah (IPD) pada 26 Propinsi di Indonesia untuk tahun 1994, tahun 1996, tahun 1998 telah dilakukan oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Selain Bappenas, Bappeda (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Klaten juga melakukan penelitian serupa untuk IPD tahun 2000, 2001, dan 2002 menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten. IPD ini dihitung berdasar pada tiga indikator utama, yaitu: (i) Kriteria Kapasitas Pemerintah, (ii) Kriteria Perkembangan Wilayah, dan (iii) Kriteria Keberdayaan Masyarakat. Masing-masing indikator di atas mempunyai 3 (tiga) sub indikator lagi. Sub indikator Kapasitas Pemerintah, yaitu: (a) Sub indikator Kapabilitas Aparat; (b) Sub indikator Keuangan Daerah ; (c) Sub indikator Sarana dan Prasarana Pemerintahan. Di sisi lain yang termasuk Sub indikator Perkembangan Wilayah, yaitu: (a) Sub indikator Fasilitas Publik; (b) Sub indikator Ekonomi Wilayah ; (c) Sub indikator Kondisi Fisik, lingkungan hidup, dan Sumber Daya Alam. Sedangkan yang termasuk Sub indikator Keberdayaan Masyarakat, yaitu: (a) Sub indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan; (b) Sub

indikator Kesejahteraan ; (c) Sub indikator Sosial Politik dan Budaya. Sub-sub indikator ini kemudian diperoleh dari data yang telah tersedia di lapangan, baik itu data primer maupun sekunder.

Penyediaan dan pemanfaatan data spasial ekonomi sebagai hasil kegiatan survei dan pemetaan, merupakan kebutuhan utama dan pertama yang harus disadari oleh pemerintah untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara rasional dan terencana dengan baik (A. Tumenggung dan Kamil 2001). Pemerintah memerlukan gambaran untuk mengetahui bagaimanakah status dan kemajuan masing-masing daerah yang berda dalam kawasan administratifnya, sehingga kebijakan yang dibuat nantinya dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Berlandaskan hal itu, sebaiknya pemerintah melakukan suatu kajian ilmiah untuk menetapkan suatu indeks atau indikator yang dapat mencerminkan status dan kemajuan suatu daerah, yang sifatnya terukur sehingga dapat diperbandingkan antar waktu maupun antar daerah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan mengukur indikator kemajuan pembangunan daerah di era otonomi, dengan studi kasus pada Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN yaitu pada, 1 (satu) kota, Kota Surakarta; dan 6 (enam) kabupaten yaitu: Kabupaten Boyolali; Kabupaten Sukoharjo; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Wonogiri; Kabupaten Sragen; dan Kabupaten Klaten.

Pengukuran ini di dasarkan pada penerapan studi mengenai Indeks Pembangunan Daerah yang sebelumnya dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2001 dan Bapeda Kabupaten Klaten pada Tahun 2003.

Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN dipilih sebagai sampel dalam penelitian dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan Kawasan Strategis Pertumbuhan di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan juga merupakan Wilayah Pembangunan VIII di Propinsi Jawa Tengah

dengan pusatnya berada di Kota Surakarta. Kawasan ini beranggotakan kabupaten dan kota dengan jumlah yang paling banyak dibanding dengan Kawasan Strategis dan Wilayah Pembangunan lain di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini di kuatkan dengan Keputusan Bersama Walikota Surakarta, Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo, Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen dan Bupati Klaten

- Nomor 10 Tahun 2001
- Nomor 590/398 Tahun 2001
- Nomor 42 Tahun 2001
- Nomor 389 Tahun 2001
- Nomor 5 tahun 2001
- Nomor 54.a Tahun 2001
- Nomor 590/ 1414 Tahun 2001

Tantang Kerjasama antar daerah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

Gambaran Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk di 7 (tujuh) Daerah di Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di

Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN Tahun 2003

No.	Daerah / Wilayah	Luas Daerah		Penduduk		Kepadatan [ penduduk per-km <sup>2</sup> ]
		Luas (Km <sup>2</sup> )	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Kota Surakarta	44,03	0,14	488.168	1,59	11.087,17
02.	Kab. Boyolali	1.015,07	3,12	906.530	2,90	893,07
03.	Kab. Sukoharjo	466,66	1,43	799.493	2,50	1.713,22
04.	Kab. Karanganyar	772,20	2,37	786.557	2,45	1.018,59
05.	Kab. Wonogiri	1.822,37	5,60	974.353	3,14	534,66

06.	Kab. Sragen	946,49	2,91	855.948	2,74	904,34
07.	Kab. Klaten	655,56	2,01	1.167.613	3,60	1.781,09
	<b>Prop. Jawa Tengah</b>	<b>32.544,12</b>	<b>100</b>	<b>31.691.866</b>	<b>100</b>	<b>973,81</b>

BAPPEDA dan BPS Propinsi Jawa Tengah (2003). **Jawa Tengah** Sumber:  
**Dalam Angka 2003.**

Apabila dilihat dari jumlah kecamatan, kelurahan, dusun/ dukuh, banyaknya rukun warga dan banyaknya rukun tetangga hingga tahun 2003; dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut.

**Tabel 1.2. Pembagian Wilayah Administrasi di Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2003**

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Wilayah Administrasi Menurut Kategori				
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun/Dukuh	Rukun Warga	Rukun Tetangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Kota Surakarta	5	51	-	589	2.616
02.	Kab. Boyolali	19	267	897	1.343	6.103
03.	Kab. Sukoharjo	12	167	1.928	1.391	3.891
04.	Kab. Karanganyar	17	177	3.404	1.835	6.020
05.	Kab. Wonogiri	25	294	-	-	-
06.	Kab. Sragen	20	207	2.492	1.708	4.962
07.	Kab. Klaten	26	401	4.523	1.147	18.779

Dirangkum dari berbagai sumber dan dokumen statistik di Kawasan Sumber:  
SUBOSUKA WONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah.

Berdasar pada kondisi dan situasi kependudukan dan pembagian wilayah administrasi di Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah seperti yang disajikan dalam Tabel 1.1 dan juga Tabel 1.2. di atas; studi mengenai pengkajian dan analisis untuk



menghasilkan suatu *indeks* atau indikator yang dapat mencerminkan status dan kemajuan suatu daerah, semisal kemajuan di suatu kecamatan atau suatu desa/kelurahan tertentu di Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah; perlu untuk dilakukan. *Indeks* atau indikator tersebut sebaiknya mempunyai sifat yang terukur sehingga dapat diperbandingkan antar waktu maupun antar daerah/wilayah. *Indeks* tersebut dapat dinamakan sebagai IPD (Indeks Pembangunan Daerah) atau *RDI (Regional Development Index)*.

## **B. Perumusan Masalah**

Secara umum, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukannya sebuah pengkajian dan analisis untuk menetapkan suatu *indeks* atau indikator yang dapat mencerminkan status dan kemajuan suatu daerah, semisal kemajuan di suatu Kabupaten/Kota tertentu. Indeks ataupun indikator tersebut sebaiknya mempunyai sifat terukur sehingga dapat diperbandingkan antar waktu ataupun antar daerah/wilayah. Indeks tersebut dapat dinamakan sebagai IPD (Indeks Pembangunan Daerah) atau *RDI (Regional Development Index)*.

Dari pokok permasalahan diatas, beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan berkaitan dengan Penyusunan dan Penghitungan Indeks Pembangunan

Daerah Sebagai Tolok Ukur Kemajuan Daerah, adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah gambaran dan kondisi hasil pengembangan dan pengukuran indikator pembangunan daerah yang diwujudkan dalam besaran/angka IPD (Indeks Pembangunan daerah) secara total menurut kecamatan di Kabupaten/Kota di wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN selama tahun 2001, 2002, dan 2003.
- 2) Bagaimana kondisi Kabupaten/Kota di wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN yang diukur dengan Indeks Pembangunan Daerah [

apakah masuk dalam kategori tinggi, sedang ataupun rendah ] di era otonomi daerah?

- 3) Apakah ada perbedaan dalam Indeks Pembangunan Daerah setiap Kabupaten/ Kota di SUBOSUKA WONOSRATEN selama 3 (tiga) tahun berturut dengan menggunakan analisis varian (uji F)

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan dari penyusunan dan penghitungan Indeks Pembangunan Daerah (*Regional Development Index*) di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah adalah untuk menyusun suatu dokumen yang memuat indeks-indeks kemajuan di suatu daerah, dalam hal ini Kabupaten/Kota, yang di dalamnya memuat aspek-aspek yang relatif dan terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah. Adapun tujuan secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui gambaran dan nilai Indeks Pembangunan Daerah di setiap Kecamatan di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN, selama tahun 2001, 2002, dan 2003.
- b. Untuk mengetahui kondisi Pembangunan daerah di setiap kecamatan di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN, selama tahun 2001, 2002, dan 2003.
- c. Untuk mengetahui dan membandingkan Pembangunan Daerah di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN, selama tahun 2001, 2002, dan 2003.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kontribusi sebagai berikut:

- a. Dapat digunakan untuk memperluas pemikiran mengenai ekonomi perencanaan regional, khususnya jika dikaitkan dengan penyusunan dan kebijakan pembangunan daerah.
- b. Dapat digunakan Sebagai alat perbandingan mengenai tingkat kemajuan pembangunan antar Daerah/ Wilayah maupun antar waktu di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN pada khususnya dan Propinsi Jawa Tengah pada umumnya.
- c. Dapat digunakan sebagai alat advokasi dan juga alat evaluasi mengenai tingkat perkembangan pembangunan daerah di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN pada khususnya dan Propinsi Jawa Tengah pada umumnya.
- d. Dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kerangka kerja di dalam perencanaan pembangunan, sekaligus sebagai alat evaluasi mengenai pemekaran/ penggabungan/ penghapusan suatu wilayah Kabupaten/Kota, dan juga sebagai alat penentuan prioritas serta perhitungan alokasi dana pembiayaan pembangunan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Paradigma Pembangunan**

Pada masa lampau ukuran keberhasilan suatu pembangunan hanya dilihat dari aspek ekonominya, tanpa memperhitungkan adanya aspek-aspek non ekonomi yang mungkin bisa mempengaruhi proses pembangunan. Seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya berbagai tantangan serta

permasalahan yang dihadapi, paradigma mengenai pembangunan pun berubah. Meier dan Baldwin dalam (Suryana 2000:3) menyebutkan bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional, termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem nasional secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2000:20).

Pembangunan sebagai proses dalam jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dalam definisi ini terdapat dua kata kunci, yaitu proses dan jangka panjang. Proses di sini mengandung arti adanya hubungan kausal antara berbagai aspek ekonomi dan non ekonomi. Sedangkan kata kunci lain yaitu jangka panjang mengandung arti bahwa sebagai suatu proses yang melibatkan hubungan sebab akibat antara berbagai aspek ekonomi dan non ekonomi, maka pelaksanaannya tidak mungkin terselesaikan dalam jangka pendek maupun jangka menengah, tetapi setidaknya diperkirakan akan memakan waktu paling tidak dua sampai tiga dasawarsa. Jadi pada dasarnya, pembangunan tidak hanya menitik beratkan pada peningkatan hasil akhirnya saja, tetapi juga menyangkut aspek-aspek apa saja (selain aspek ekonomi) yang kemungkinan dapat mempengaruhi proses atau bagaimana hasil akhir tersebut dapat dicapai. Karena

itulah, tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai pelaksana pembangunan menjadi semakin besar.

Menyikapi hal tersebut di atas, pemerintah telah berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem pemerintahannya. UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah telah mengubah paradigma pembangunan daerah yang sekarang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Dan kedua undang-undang tersebut telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan dikeluarkannya UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengindikasikan bahwa pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam usaha untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*).

## **2. Pembangunan Daerah**

Pembangunan daerah diartikan sebagai suatu proses yang berdimensi banyak yang melibatkan perubahan besar dalam struktur social, sikap masyarakat dan kelembagaan daerah, semisal percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan faktor penentu lainnya (Mulyanto, 2004). Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memperluas kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan hubungan antar daerah / wilayah serta terus diupayakan adanya proses pergeseran struktur kegiatan ekonomi. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan

daerah adalah: (i) mendorong mengupayakan pekerjaan yang berkualitas tinggi bagi penduduk engan mengupayakan peningkatan sumber daya yang berkualitas, sehingga mampu berperan dalam aktivitas yang lebih produktif (ii) menciptakan stabilitas ekonomi dengan cara menyiapkan sarana prasaranayang dibutuhkan bagi pengembangan aktivitas ekonomi daerah.

Arsyad (1999) mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan di sini mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembnaganan industri alternatif perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan utama pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.

Todaro menyebutkan bahwa tiga tujuan inti dari pembangunan adalah

sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan

kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atau nilai-nilai kultural dan kemanusiaan.

- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau bangsa lain, namun juga terdapat setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

### **3. Indikator-Indikator Pembangunan Daerah**

Sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu negara dapat dilihat dari indikator-indikator pembangunan yang memang sudah ditetapkan sebelumnya. Suryana (2000:30) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha pembangunan ekonomi yaitu: (i) faktor ekonomi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal, teknologi, dan kewirausahaan (ii) faktor non ekonomi meliputi aspek politik, social budaya, dan kebiasaan. Indikator-indikator sosial non ekonomi tersebut (Todaro, 2000:18) antara lain adalah tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, kondisi-kondisi dan kualitas pelayanan kesehatan, kecukupan kebutuhan akan perumahan, dan sebagainya. Salah satu contoh indikator sosial non ekonomi yang paling menonjol adalah *Human Development Index* (Indeks

Pembangunan Manusia/HDI) yang merupakan indikator cipataan PBB.

Indikator pembangunan di bidang ekonomi biasanya tersedia dalam bentuk data-data kuantitatif yang bisa diukur besarnya, sedang indikator-indikator non ekonomi sebagian besar masih bersifat data kualitatif. Tetapi ketersediaan



data indikator non ekonomi meski masih berupa data kualitatif, sangatlah diperlukan. Karena itu, diharapkan nantinya dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, indikator-indikator non ekonomi tersebut dapat disajikan dalam bentuk data kuantitatif. Kadiman (2001) mencontohkan indikator-indikator pembangunan sebagaimana termuat dalam dokumen propenas sebagai kerangka referensi yang paling relevan saat ini bagi Indonesia

seperti terlihat di bawah ini:

- a. Indikator Ekonomi, meliputi: Pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi (%), surplus/defisit APBN atau PDB (%), sumbangan pertumbuhan ekonomi, investasi dan sumber pembiayaan (%), indikator yang menyangkut perubahan struktur ekonomi yaitu distribusi PDB (%) dan distribusi kesempatan kerja (%).
- b. Indikator Non-Ekonomi, meliputi:
  - 1) Di bidang hukum, yaitu: a) meningkatnya peran dan fungsi program legislasi nasional; b) meningkatnya jumlah tenaga perancang perundang-undangan yang lebih berkualitas.
  - 2) Di bidang sosial budaya, yaitu: a) meningkatnya presentase keluarga yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat keehatan; b) meningkatnya presentase keluarga yang menggunakan air bersih di perkotaan dan pedesaan; c) meningkatnya presentase tempat-tempat umum dan pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan; d) meningkatnya presentase keluarga yang menghuni rumah sehat; e) menurunnya prevalensi gizi kurang balita dari 26,3 % menjadi 20 %; f) menurunnya prevalensi gizi lebih dari 12 % menjadi kurang dari 10%.



- 3) Di bidang politik, yaitu: a) terwujudnya berbagai jenis fasilitas sosialisasi politik dan komunikasi politik bagi kegiatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan; b) meningkatkan budaya politik yang demokratis guna memantapkan persatuan dan kesatuan antar komponen bangsa; c) meningkatnya sikap dan perilaku toleran antar berbagai suku, agama, ras dan bangsa.

Dalam perencanaan ekonomi suatu wilayah/daerah pada umumnya dipertanyakan: (i) bagaimana mengusahakan agar peningkatan pendapatan masyarakat terjadi secara mantap, dan (ii) bagaimana distribusi pendapatan tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara adil dan merata. Karena itu, Mulyanto (2004) menyusun beberapa indikator ekonomi dan non ekonomi berdasar data-data yang telah tersedia di daerah sebagai berikut:

a. Indikator Ekonomi

- 1) Tingkat pertumbuhan ekonomi
- 2) Tingkat Kemakmuran suatu daerah
- 3) Tingkat inflasi
- 4) Struktur ekonomi atau struktur PDB (Produk Domestik Bruto) atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut pendekatan produksi atau sektoral.
- 5) Produktivitas sektoral, yang merupakan rasio antara nilai tambah setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan
- 6) Struktur PDB atau PDRB menurut pendekatan pengeluaran

- 7) Besaran ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*)
  - 8) Disparitas pendapatan regional yang dilihat dari perbedaan
    - Pendapatan perkapita
    - Tingkat pertumbuhan PDB atau PDRB
    - Kemampuan investasi
    - Besaran Indeks Gini (*Gini Ratio Indeks*)
  - 9) Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan
    - Pajak terhadap PDB atau PDRB
    - Biaya pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDB atau PDRB
    - Perbandingan penerimaan pemerintah terhadap PDB dan PDRB
      - Perbandingan pengeluaran rutin dan pembangunan
    - Komposisi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
      - Struktur pembiayaan pembangunan
- b. Indikator non-ekonomi
- 1) Indikator sosial, meliputi:
    - a). Indikator Kependudukan
    - b). Indikator Keluarga Berencana
    - c). Indikator Tenaga kerja
    - d). Indikator Pendidikan
    - e). Indikator Kesehatan
    - f). Indikator Gizi
    - g). Indikator Rumah Tangga
    - h). Indikator Hukum

- i). Indikator Politik
- j). Indikator Keamanan dan Ketertiban umum

## 2) Indikator Fisik Prasarana

Indikator-indikator Fisik Prasarana meliputi berbagai unsur yaitu

:

- a). Prasarana Jalan
- b). Angkutan Udara
- c). Angkutan Laut
- d). Telekomunikasi
- e). Energi
- f). Irigasi
- g). Lingkungan Hidup dan Perubahan

Selanjutnya merupakan gabungan dari kedua indikator di atas yang disebut Indikator Gabungan. Todaro (2000) menyebutkan, salah satu studi awal dalam merumuskan indikator-indikator tersebut dilakukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1970 dinamakan sebagai Indikator Sosio-Politik-Ekonomi, ada 16 komponen yang dikembangkan dalam indikator ini, yang meliputi :

- a. Usia Harapan Hidup
- b. Persentase penduduk di suatu daerah dengan jumlah penduduk 20.000 orang atau lebih
- c. Konsumsi Protein Hewani perkapita perhari
- d. Tingkat capaian pendidikan dasar dan lanjutan
- e. Rasio pendidikan ketrampilan / vokasional

- f. Jumlah rata-rata orang per meter ruang (rumah, sekolah dan sebagainya)
- g. Konsumsi Surat Kabar per 1000 orang
- h. Persentase penduduk yang menikmati konsumsi listrik, gas dan air bersih
- i. Hasil pertanian per pekerja pertanian pria
- j. Persentase pekerja pria dewasa yang bekerja di sektor pertanian
- k. Konsumsi listrik (kilo watt per kapita)
- l. Konsumsi baja (kg per kapita)
- m. Konsumsi energi (ekuivalen kg batubara perkapita)
- n. Persentase PDB/PDRB dari industri pengolahan
- o. Perdagangan luar negeri (perkapita dalam harga konstan)
- p. Persentase pekerja dengan upah terhadap seluruh pekerja

Bentuk indikator lain yang sejenis dengan indikator diatas dikemukakan

pada tahun 1970 oleh Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (Mulyanto, 2004)

yang mengklasifikasikan 74 negara berkembang berdasarkan 40 variabel

indikator yang mencakup aspek :

- a. Urbanisasi
- b. Mobilitas Sosial
- c. Tingkat Melek Huruf
- d. Integritas Nasional
- e. Kebebasan Politik dan Pers
- f. Kekuatan Serikat Buruh
- g. Produk Domestik Bruto
- h. Besarnya Alokasi Investasi

Tiga kritik besar/utama atas kedua pendekatan tersebut di atas adalah (i) indikator-indikator yang digunakan lebih menekankan perubahan struktur ketimbang kesejahteraan; (ii) Negara-negara berkembang seakan-akan harus berubah sesuai dengan pola yang terjadi di negara maju; dan (iii) Penekanannya pada input (misalnya jumlah dokter per 1000 orang dan sebagainya); dan bukannya pada output, yakni tingkat masyarakat. Untuk menanggapi kritik itu dikembangkan indikator untuk mengukur kualitas hidup manusia yaitu : PQLI

(*Physical Quality of Life Index*) dan HDI (*Human Development Index*)

a. Indeks Kualitas hidup Fisik (PQLI, *Physical Quality of Life Index*)

Pendekatan ini dikemukakan oleh Morris. D Morris (1979) yang mengukur kualitas hidup manusia dari sekumpulan indeks komposit yang memasukkan 3 (tiga) unsur/komponen yaitu:

1. Usia Harapan hidup pada usia 1(satu) tahun
2. Tingkat Kematian Bayi
3. Tingkat Melek Huruf

Untuk masing-masing indikator di negara-negara yang dijadikan sample diurutkan dari yang paling kecil yang paling besar dengan skala 1-100 dimana nilai 1(satu) menunjukkan kinerja terburuk, dan nilai 100 (seratus) menandakan kinerja terbaik.

b. Indeks Pembangunan Manusia (HDI, *Human Development Index*)

Model ini dilansir oleh UNDP (*United Nations Development Program*) sejak tahun 1990 melalui laporannya dalam HDI (*Human Development Index*) yang digunakan untuk mengukur dan melihat mutu kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) suatu Negara.

HDI diciptakan oleh UNDP berdasarkan pandangan bahwa kemajuan suatu Negara tidak dapat dilihat hanya dengan ukuran pendapatan nasional/daerah, HDI merupakan gabungan dari :

- i. Panjang hidup dengan indikator usia harapan hidup
- ii. Pengetahuan dengan indikator rata-rata tertimbang dari :
  - Tingkat melek huruf orang dewasa, dengan bobot 2/3
  - Rata-rata lamanya tahun sekolah, dengan bobot 1/3
- iii. Kesejahteraan ekonomi yang diukur dengan pendapatan dengan indikator PDB perkapita setelah disesuaikan dengan paritas daya beli masyarakat (PPP; *Purchasing Power Parity*)

Perhitungan HDI dilakukan dengan mencari selisih nilai masing-masing indikator di suatu Negara dengan indikator tertinggi di dunia dengan selisih indikator dari nilai tertinggi (*maksimum*) dan nilai terendah (*minimum*). Metode perhitungannya menurut Rowter dalam Mulyanto dilakukan sebagai berikut:

- 1) Masing-masing indikator dinyatakan dengan X, misalnya :

: Usia harapan hidup - X1

: 2/3 tingkat melek huruf + 1/3 rata-rata tahun sekolah - X2

: PDB perkapita berdasar paritas daya beli (PPP) - X3

- 2) Untuk masing-masing negara dihitung indeks kekurangan (*deprivation*) dengan cara :

$$\dots\dots\dots (1.1) \quad I_{ij} = \frac{(\max X_{ij} - X_{ij})}{(\max X_{ij} - \min X_{ij})}$$

dimana, j menunjukkan Negara ke-j dan I indikator ke-i

- 3) Kemudian dilakukan penghitungan

$$\dots\dots\dots (1.2) I_j = 1/3 \times \sum_{i=1}^3 I_{ij}$$

4) Terakhir, dilakukan perhitungan:

$$HDI_j = (1 - I_j) \dots\dots\dots (1.3)$$

#### 4. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mulai dijalankan pada awal tahun 2001. Otonomi daerah merupakan konsekuensi dari adanya kebijakan desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Wewenang yang dulu dimiliki oleh pemerintah pusat, sekarang dengan adanya desentralisasi maka sebagian akan berpindah tangan ke pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah sebagai dampak dikeluarkannya kebijakan desentralisasi ini, dilakukan dengan tujuan:

- a. Dimensi Politik; dengan menjadikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik dalam rangka mengembangkan demokratisasi;
- b. Dimensi Administratif; berarti mengisyaratkan pemerintah daerah untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. Dimensi Ekonomi; dimana dengan otonomi daerah diharapkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah diwujudkan.

Pedoman pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 22 tahun 1999; harus memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan berlandaskan pada asas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pada intinya, penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai proses aktualisasi diri pemerintah daerah dalam pembangunan, setelah sekian lama hanya bertindak sebagai fasilitator bukannya penentu pembangunan.

Otonomi daerah dilaksanakan tentunya dengan harapan dapat mencapai sebuah kesuksesan / keberhasilan. Adapun syarat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana disebutkan Rasyid dan Paragoan dalam Eko W.

Suwardyono dalam Mulyanto (2003:3) ditentukan oleh:

- a. *Self Regular Power*
- b. *Self Modifying power*
- c. *Creating Local Political Support*
- d. *Managing Financial Resources*
- e. *Developing Brain Power*

Menurut Kaho dalam mulyanto (2000:3), ada 4 (empat) faktor penentu keberhasilan otonomi daerah, yaitu: (i) faktor manusia sebagai subyek penggerak otonomi daerah, (ii) faktor keuangan yang merupakan tulang punggung penyelenggaraan otonomi, (iii) faktor peralatan sebagai sarana pendukung pelaksanaan otonomi, serta (iv) faktor organisasi dan manajemen.

## **B. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) pada tahun 2001 melakukan perhitungan terhadap IPD (Indeks Pembangunan Daerah) tiap Propinsi yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Model IPD ini disusun berdasarkan 3 (tiga) indikator utama yaitu: (i) Kriteria Kapasitas Pemerintah, (ii)



Kriteria Perkembangan Wilayah, dan (iii) Kriteria Keberdayaan Masyarakat. Masing-masing indikator di atas mempunyai 3 (tiga) sub indikator lagi. Sub indikator Kapasitas Pemerintah, yaitu: (a) Sub indikator Kapabilitas Aparat; (b) Sub indikator Keuangan Daerah ; (c) Sub indikator Sarana dan Prasarana Pemerintahan. Di sisi lain yang termasuk Sub indikator Perkembangan Wilayah, yaitu: (a) Sub indikator Fasilitas Publik; (b) Sub indikator Ekonomi Wilayah ; (c) Sub indikator Kondisi Fisik, lingkungan hidup, dan Sumber Daya Alam. Sedangkan yang termasuk Sub indikator Keberdayaan Masyarakat, yaitu: (a) Sub indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan; (b) Sub indikator Kesejahteraan ; (c) Sub indikator Sosial Politik dan Budaya. Sub-sub indikator ini kemudian diperoleh dari data yang telah tersedia di lapangan, baik itu data primer maupun sekunder.

Hasil akhir perhitungan tersebut menyatakan bahwa DKI Jakarta, merupakan propinsi yang selalu memiliki IPD tertinggi kurun waktu 1994, 1996 dan 1998. DI Yogyakarta menempati urutan kedua pada tahun 1994 namun pada dua periode berikutnya, Propinsi Bali dapat mengunggulinya. Ketiga propinsi di atas selalu berada pada urutan teratas. Tahun 1994 urutan keempat dan kelima ditempati oleh propinsi Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara. Tetapi pada tahun berikutnya , 1996, posisi tersebut ditempati oleh propinsi Riau dan Bengkulu. Pada tahun 1998 penurunan terjadi pada IPD Riau sehingga posisi keempat dan kelima ditempatinoleh propinsi Bengkulu dan Sulawesi Tenggara. IPD terendah berturut-turut pada tahu 1994, 1996 dan 1998 adalah Jawa barat, Nusa Tenggara Barat, dan Irian Jaya. Kejelasan mengenai perhitungan IPD propinsi di wilayah Negara

Indonesia yang dilakukan Bappenas dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Indeks Pembangunan Daerah, Menurut Propinsi di Indonesia Tahun 1994, 1996, dan 1998<sup>\*)</sup>**

No	Propinsi	1994		1996		1998	
		Indeks	Ranking	Indeks	Ranking	Indeks	Ranking
1	NAD	4,1094	22	4,2945	23	4,4539	15
2	Sumatera Utara	4,3342	16	4,3916	19	4,4596	12
3	Sumatera Barat	4,9354	4	4,8931	6	4,7082	7
4	Riau	4,3603	15	5,0128	4	4,4184	16
5	Jambi	4,3203	17	4,4641	16	4,1975	22
6	Sumatera Selatan	4,2502	19	4,4357	18	4,3490	19
7	Bengkulu	4,6518	7	4,9346	5	4,7831	4
8	Lampung	4,1048	23	4,3493	20	4,3883	18
9	DKI Jakarta	6,5455	1	7,0101	1	6,2800	1
10	Jawa Barat	3,9522	26	4,3408	21	4,1376	24
11	Jawa Tengah	5,7117	25	4,1890	25	4,4055	17
12	D.I. Yogyakarta	4,5017	2	5,6888	3	5,5018	3
13	Jawa Timur	4,1582	13	4,6053	12	4,5982	11
14	Kalimantan Barat	4,1313	20	4,2437	24	4,2851	20
15	Kalimantan Tengah	4,2579	21	4,5429	14	4,5534	13
16	Kalimantan Selatan	4,7008	18	4,8333	8	4,6814	9
17	Kalimantan Timur	4,5266	6	4,8857	7	4,7151	6
18	Sulawesi Utara	4,4753	12	4,6274	10	4,6586	10
19	Sulawesi Tengah	4,5825	14	4,5244	15	4,5687	12
20	Sulawesi Selatan	4,8280	10	4,6497	9	4,6960	8
21	Sulawesi Tenggara	5,6538	5	4,6200	11	4,7640	5
22	Bali	5,6538	3	6,0266	2	5,7618	2
23	NTB	3,9830	24	4,1638	26	4,2261	21
24	NTT	4,5897	9	4,5440	13	4,1260	25
25	Maluku	4,6401	8	4,4500	17	4,1761	23
26	Papua	4,5661	11	4,2994	22	4,0951	6
	Rata-rata	4,5678		4,7316		4,6149	

Catatan: <sup>\*)</sup> ranking penilaian IPD antara 1 sampai 9

Sumber: Bappenas 2001. Indeks Pembangunan Daerah (Regional Development Index), hal 4-5 dalam Mulyanto (2004).

Penelitian mengenai Indeks Pembangunan Daerah juga dilakukan oleh Bappeda (Badan Perencana Daerah) Kabupaten Klaten bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Sebelas Maret (Lemlit UNS) Surakarta pada tahun

2003, berupa laporan akhir "Indeks Pembangunan daerah (*Regional Development Index*) Kabupaten Klaten". Perhitungan IPD menurut 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, mengambil kurun waktu antara tahun 2000 sampai tahun 2002. hasil akhir dari laporan tersebut tercantum seperti dalam tabel 1.7 di bawah ini.

**Tabel 2.2. Indeks Pembangunan Daerah, Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2000, 2001, dan 2002**

No	Kecamatan	2000		2001		2002	
		Indeks	Ranking	Indeks	Ranking	Indeks	Ranking
1	Klaten Tengah	3,8047	1	4,0328	1	5,0975	1
2	Klaten Utara	3,4781	2	3,9031	2	4,1356	2
3	Kebonarum	3,2546	3	3,4412	4	3,5729	10
4	Trucuk	2,9844	4	3,3784	5	3,6252	8
5	Jogonalan	2,7898	5	2,9974	12	3,2192	17
6	Kalikotes	2,7267	6	3,0398	11	3,2647	15
7	Ceper	2,7103	7	2,9790	13	3,3373	14
8	Manisrenggo	2,6435	8	2,4650	23	3,6437	7
9	Wonosari	2,4340	9	2,9617	14	3,5034	11
10	Cawas	2,4157	10	2,5928	19	3,0928	21
11	Kemalang	2,3890	11	3,2644	7	3,8089	6
12	Gantiwarno	2,3160	12	2,6488	17	3,2077	18
13	Delanggu	2,3127	13	3,2828	6	3,8724	5
14	Klaten Selatan	2,3020	14	3,1184	8	3,9495	3
15	Jatinom	2,2483	15	2,5348	20	3,3830	13
16	Prambanan	2,2074	16	2,2945	24	2,7455	25
17	Pedan	2,1877	17	3,0408	10	3,3913	12
18	Polanharjo	2,1719	18	2,1695	26	2,9354	23
19	Karanganom	2,0980	19	2,5161	21	3,2439	16
20	Juwiring	2,0497	20	2,4974	22	3,6242	9
21	Karangnongko	2,0165	21	2,6910	16	3,1676	20
22	Karangdowo	2,0101	22	2,6281	18	2,8948	24
23	Bayat	1,9027	23	2,7585	15	3,0237	22
24	Wedi	1,8709	24	2,2326	25	2,6943	26
25	Tulung	1,6440	25	3,5798	3	3,1983	19
26	Ngawen	1,6319	26	3,0790	9	3,9065	4
Rata-rata		2,4077		2,9279		3,4438	

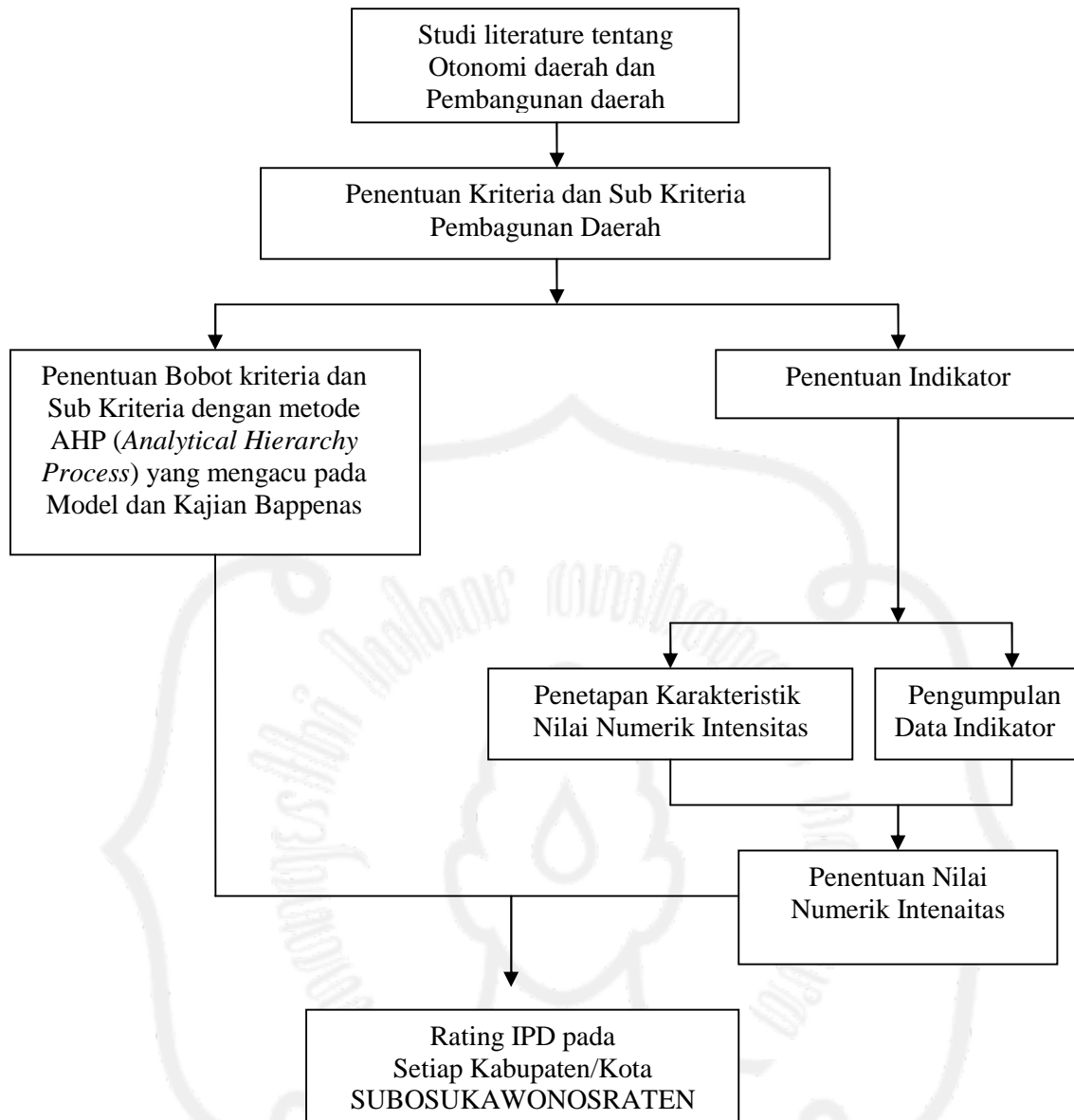
Sumber: Kerjasama Bappeda Klaten dan Lemlit UNS 2003. Indeks Pembangunan Daerah (*Regional Development Index*) Kabupaten Klaten.

Dari tabel 1.7. ditunjukkan bahwa Kecamatan Klaten Tengah dan Klaten Utara secara berturut-turut pada tahun 2000, 2001 dan 2002 tetap menempati posisi pertama dan kedua dalam ranking IPD Kabupaten Klaten, sedang posisi ketiga pada tahun 2000 ditempati oleh Kecamatan Kebonarum dengan nilai IPD sebesar 3,2546. Tahun berikutnya secara berturut-turut, posisi Kecamatan Kebonarum

digeser dan ditempati oleh Kecamatan Tulung dengan nilai IPD sebesar 3,5798 di tahun 2001 dan oleh Kecamatan Klaten Selatan dengan IPD sebesar 3,9495 di tahun 2002. tiga kecamatan dengan nilai IPD terendah berturut-berturut pada tahun 2000, 2001 dan 2002 adalah Kecamatan Ngawen (sebesar 1,6319), Kecamatan Polanharjo (sebesar 2,1695) dan Kecamatan Wedi (sebesar 2,6943).

### **C. Kerangka Pemikiran Studi**

Kerangka pemikiran studi yang digunakan di dalam penyusunan dan perumusan IPD (Indeks Pembangunan Daerah) di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah adalah kajian data statistik dengan model skoring atau penentuan bobot, adapun tahapan penyusunannya dapat digambarkan melalui skema, seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.1 :



Gambar 2.1. Kerangka Penyusunan Indeks Pembangunan Daerah di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah

Sumber : Bappenas 2001, Indeks Pembangunan Daerah (*Regional Development Index*), hal 2, dalam Mulyanto (2004) diadopsi seperlunya.

#### D. Hipotesis

Berdasar pada uraian di atas, beberapa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Gambaran dan kondisi hasil pengembangan dan pengukuran Indikator Pembangunan Daerah yang diwujudkan dalam besaran / angka IPD (Indeks Pembangunan Daerah) secara total menurut kecamatan di Kabupaten/Kota di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN selama tahun 2001, 2002, dan 2003; diduga mengalami perbedaan yang berarti.
- b. Kategori pengukuran Indikator Pembangunan Daerah yang diwujudkan dalam besaran / angka IPD (Indeks Pembangunan Daerah) secara total menurut kecamatan di Kabupaten/Kota di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN selama tahun 2001, 2002, dan 2003; diduga mengalami perbedaan yang berarti.
- c. Gambaran dan kondisi hasil pengembangan dan pengukuran Indikator Pembangunan Daerah yang diwujudkan dalam besaran / angka IPD (Indeks Pembangunan Daerah) secara total menurut Kabupaten/Kota di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN selama tahun 2001, 2002, dan 2003; diduga mengalami perbedaan yang berarti.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berbentuk survei atas data-data sekunder tahun 2001, 2002, dan 2003 yang telah tersedia di dinas / kantor di 124 kecamatan dalam kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN. Survei lapangan dilakukan kepada para pejabat di lingkungan pemerintahan di Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN apabila ada

data-data pelengkap yang belum tersedia. Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada indikator-indikator pembentuk IPD yang kemudian diturunkan menjadi sub-sub indikator yang diperoleh dari data-data yang telah tersedia mulai tahun 2001 sampai 2003.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data

primer. Beberapa sumber data sekunder yang dapat digunakan, antara lain:

1. Buku Kabupaten / Kota se SUBOSUKAWONOSRATEN Dalam Angka tahun 2001, 2002, dan 2003.
2. Buku PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten/Kota SUBOSUKA WONOSRATEN tahun 2001, 2002, dan 2003.
3. Laporan Pertanggung Jawaban Bupati / Walikota se SUBOSUKA WONOSRATEN tahun 2001, 2002, dan 2003.
4. Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pembangunan di Kabupaten / Kota se SUBOSUKA WONOSRATEN tahun 2001, 2002, dan 2003.

Adapun data primer diperoleh dari dinas/instansi terkait di lingkungan pemerintahan Kabupaten / Kota se SUBOSUKA WONOSRATEN apabila ada data statistik belum tersedia.

## **C. Pengukuran Variabel**

Dalam Penelitian ini digunakan variabel kualitatif berupa kriteria-kriteria Indeks Pembangunan Daerah. Perhitungan bobot kriteria dan sub kriteria tidak dilakukan dengan penelitian secara tersendiri, namun mengadopsi dan

menggunakan hasil studi yang telah dilakukan Bappenas (2001), meliputi 3 (tiga) indikator global besar yaitu : Kriteria Kapabilitas Pemerintah, Kriteria perkembangan Wilayah, dan Kriteria Keberdayaan Masyarakat. Gambaran penjabarannya sebagai berikut :

#### 1. Kriteria Kapasitas Pemerintahan

Kriteria Kapasitas Pemerintahan mengukur dan melihat dimensi pemerintahan dari 3 aspek yaitu : (i) Aspek Kapabilitas Aparat; (ii) Aspek Keuangan Daerah ; (iii) Aspek Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

#### 2. Kriteria Perkembangan Wilayah

Kriteria Perkembangan Wilayah mengukur dan melihat dimensi wilayah dari 3 (tiga) aspek yaitu : (i) Aspek Fasilitas Publik; (ii) Aspek Ekonomi Wilayah ; (iii) Aspek Kondisi Fisik, lingkungan hidup, dan Sumber Daya Alam.

#### 3. Kriteria Keberdayaan Masyarakat

Kriteria Keberdayaan Masyarakat, mengukur dan melihat dimensi tingkat Keberdayaan masyarakat dari 3 (tiga) aspek, yaitu : (i) Aspek Kependudukan dan Ketenagakerjaan; (ii) Aspek Kesejahteraan ; (iii) Aspek Sosial Politik dan Budaya.

### **D. Teknik dan Metode Analisis data**

Model IPD ini disusun berdasarkan 3 (tiga) indikator utama yaitu: (i) Kriteria Kapasitas Pemerintah, (ii) Kriteria Perkembangan Wilayah, dan (iii) Kriteria Keberdayaan Masyarakat. Masing-masing indikator di atas mempunyai 3 (tiga) sub indikator lagi. Sub indikator Kapasitas Pemerintah, yaitu: (a) Sub indikator Kapabilitas Aparat; (b) Sub indikator Keuangan Daerah ; (c) Sub



indikator Sarana dan Prasarana Pemerintahan. Di sisi lain yang termasuk Sub indikator Perkembangan Wilayah, yaitu: (a) Sub indikator Fasilitas Publik; (b) Sub indikator Ekonomi Wilayah ; (c) Sub indikator Kondisi Fisik, lingkungan hidup, dan Sumber Daya Alam. Sedangkan yang termasuk Sub indikator Keberdayaan Masyarakat, yaitu: (a) Sub indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan; (b) Sub indikator Kesejahteraan ; (c) Sub indikator Sosial Politik dan Budaya.

#### 1. Kriteria Kapasitas Pemerintahan

Kriteria Kapasitas Pemerintah terdiri dari 3 (tiga) sub indikator yaitu:

##### a. Kriteria Kapabilitas Pemerintah

Kriteria Kapabilitas Pemerintah didekati dan diukur dengan

indikator-indikator sebagai berikut :

- Rasio jumlah Camat (bobot 0,7 atau 70%) dan juga jumlah Sekretaris Kecamatan (bobot 0,3 atau 30%) di masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan di Wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN
- Rasio jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ditempatkan di setiap Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota yang bersangkutan di Wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN
- Rasio jumlah Alokasi Dana dari sumber APBD di Kabupaten/Kota yang didekati dengan jumlah Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan terhadap jumlah PNS yang ditempatkan di Kabupaten/Kota di Wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN

#### b. Kriteria Keuangan Daerah

Kriteria Keuangan Daerah didekati dan diukur dengan indikator-

indikator sebagai berikut :

- Rasio jumlah Alokasi Dana dari sumber APBD terhadap jumlah PDRB Harga Berlaku Non Pertambangan dan Penggalian di masing-masing

Kabupaten/kota Wilayah SUBOSUKA WONOSRATEN

- Rasio jumlah Pengeluaran Pembangunan keseluruhan yang meliputi dana dari pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Kabupaten/Kota terhadap jumlah Pengeluaran Pembangunan

keseluruhan Kabupaten/Kota

- Rasio jumlah Penerimaan Dana di luar APBD yang didekati dengan realisasi Penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terhadap jumlah realisasi Penerimaan PBB keseluruhan di Kabupaten/Kota

#### c. Kriteria Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Kriteria Sarana dan Prasarana Pemerintahan didekati dan diukur

dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- Rasio jumlah Belanja Rutin terhadap Jumlah Belanja Pegawai pada masing-masing Kabupaten/Kota

- Rasio jumlah saluran pelanggan telepon kategori rumah tangga terhadap jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota

- Rasio luas wilayah terhadap jumlah kecamatan pada masing-masing Kabupaten/Kota.

## 2. Kriteria Perkembangan Wilayah

Kriteria Perkembangan Wilayah terdiri dari 3 (tiga) sub indikator yaitu:

### a. Kriteria Ketersediaan Fasilitas Publik

Kriteria Ketersediaan Fasilitas Publik didekati dan diukur dengan

indikator-indikator sebagai berikut :

- Rasio jumlah Balai Kesehatan yang meliputi Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten/Kota
- Rasio jumlah siswa SMU dan yang sederajat baik swasta maupun negeri terhadap jumlah penduduk usia 15-19 tahun (seharusnya 16-18 tahun) di setiap kabupaten/Kota
- Rasio jumlah panjang jalan yang meliputi Jalan Negara, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Kecamatan terhadap luas wilayah di setiap Kabupaten/Kota

### b. Kriteria Ekonomi Wilayah

Kriteria Ekonomi Wilayah didekati dan diukur dengan indikator-

indikator sebagai berikut :

- Rasio jumlah PDRB harga berlaku terhadap jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota
- Rasio jumlah investasi keseluruhan yang meliputi investasi pemerintah, investasi swasta dan swadana murni masyarakat terhadap jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota

- Rasio jumlah lembaga yang meliputi Bank umum pemerintah, Bank umum swasta, Bank Perkreditan Rakyat, dan lembaga perbankan sejenis terhadap jumlah kecamatan di setiap Kabupaten/Kota.

c. Kriteria kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Kriteria Fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam didekati

dan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- Rasio luas kawasan lindung terhadap luas wilayah di masing-masing Kabupaten/Kota
- Rasio jumlah Kecamatan yang diduga terkena pencemaran padat dan cair terhadap jumlah Kecamatan di setiap Kabupaten/Kota
- Rasio jumlah Kecamatan yang diduga terkena pencemaran gas terhadap jumlah Kecamatan di setiap Kabupaten/Kota

3. Kriteria Keberdayaan Masyarakat

Kriteria Keberdayaan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) sub indikator

yaitu:

a. Kriteria Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kriteria Kependudukan dan Ketenagakerjaan didekati dan diukur

dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- Rasio Angkatan Kerja yang Bekerja terhadap Jumlah Angkatan Kerja keseluruhan di setiap Kabupaten/Kota
- Rasio Jumlah Tenaga Kerja di sektor Industri terhadap jumlah tenaga kerja di luar sektor Industri di setiap Kabupaten/Kota

- Rasio Jumlah Angkatan Kerja lulusan SMU/ sederajat dan Akademi/PT/Universitas yang belum mendapatkan pekerjaan terhadap jumlah Angkatan Kerja keseluruhan di setiap Kabupaten/Kota

b. Kriteria Kesejahteraan Masyarakat

Kriteria Kesejahteraan Masyarakat didekati dan diukur dengan

indikator-indikator sebagai berikut :

- Rasio Jumlah Penduduk miskin (bobot 0,5 atau 50%) dan jumlah Penduduk Prasejahtera (bobot 0,5 atau 50%) terhadap jumlah penduduk di setiap Kabupaten/kota
- Rasio Jumlah Kematian Bayi terhadap jumlah kelahiran bayi di setiap Kabupaten/Kota
- Rasio pengeluaran/ Konsumsi Bukan makanan terhadap rata-rata pengeluaran/konsumsi keseluruhan di setiap Kabupaten/Kota

c. Kriteria Sosial Politik dan Budaya

Kriteria Sosial Politik dan Budaya didekati dan diukur dengan

indikator-indikator sebagai berikut :

- Rasio Jumlah Desa/Kelurahan yang mempunyai BPD terhadap jumlah Desa/Kelurahan di setiap Kabupaten/Kota
- Rasio jumlah Panti Asuhan dan Panti Jompo terhadap jumlah Kecamatan di setiap Kabupaten/Kota
- Rasio jumlah tindak kekerasan yang antara lain meliputi pembunuhan dan pencurian terhadap jumlah Kecamatan di setiap Kabupaten/kota

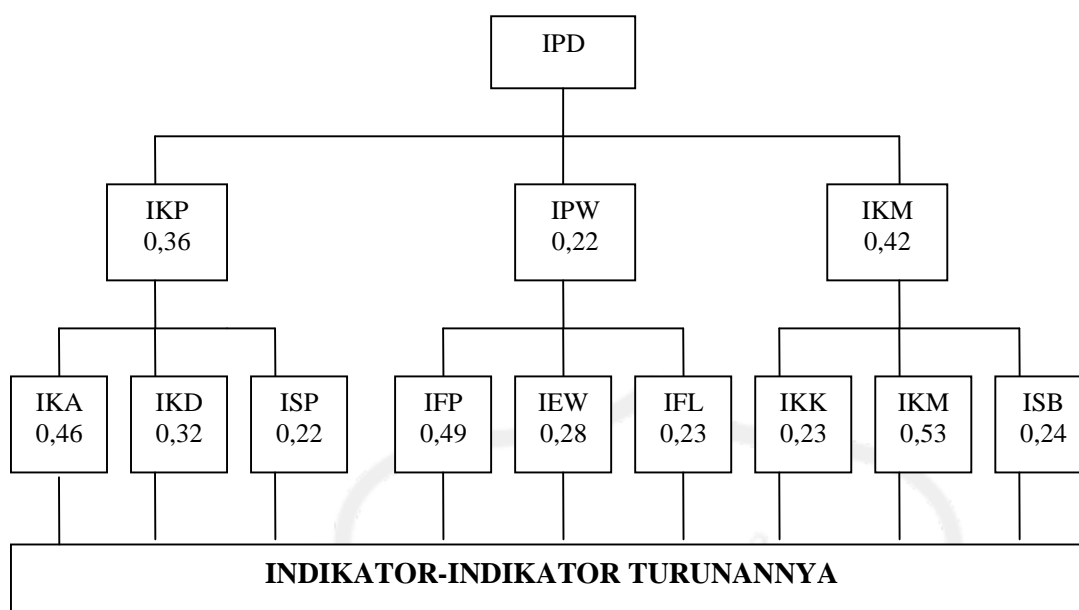
Penentuan bobot kriteria atas kriteria dan sub kriteria yang dilakukan oleh

Bappenas (2001), didasarkan atas survey kepada para pakar (sekitar 15 orang),

yang terdiri dari para pejabat dan staf perenanaan di lingkungan Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam Bappenas serta beberapa pakar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Perangkat survey yang digunakan adalah yang yang terdiri dari para pejabat dan staf perenanaan di lingkungan Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam Bappenas serta beberapa pakar dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Perangkat survey yang digunakan adalah kuesioner AHP (*Analytical Hierarchy Procces*), dan perangkat lunak EC (*Expert Choice*). Kuesioner disebarakan untuk diisi oleh para pakar dan hasilnya dimasukkan ke Program EC.

Bobot dibuat untuk membandingkan kriteria yang satu dengan yang lain, menurut urutan mana yang lebih penting. Bobot juga dibuat untuk membandingkan sub kriteria yang satu dengan yang lain pada msing-masing kriteria berdasarkan urutan mana yang lebih penting. Bobot tersebut berupa nilai dan jumlahnya sama dengan 1 (satu) untuk setiap level / tingkat pada hierarki.

Setelah bobot diperoleh, maka bobot ini akan digunakan untuk menentukan IPD (Indeks Pembangunan Daerah) yang mengukur tingkat kemajuan pembangunan di suatu wilayah Kabupaten/Kota. Gambaran mengenai klasifikasi bobot kriteria dan sub kriteria hasil AHP yang telah dilakukan Bappenas (2001) dengan beberapa modifikasi dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut :



Keterangan :

1. IPD : Indeks Pembangunan Daerah  
( $IPD = 0,36 \times IKP + 0,22 \times IPW + 0,42 \times IKM$ )
2. IKP : Indeks Kapasitas Pemerintah  
( $IKP = 0,46 \times IKA + 0,32 \times IKD + 0,22 \times ISP$ )
  - : Indeks Kapabilitas Aparat IKA
  - : Indeks Keuangan Daerah IKD
  - : Indeks Sarana dan Prasarana Pemerintahan ISP
3. IPW : Indeks Perkembangan Wilayah  
( $IPW = 0,49 \times IFP + 0,28 \times IEW + 0,23 \times IFL$ )
  - : Indeks Fasilitas Publik IFP
  - : Indeks Ekonomi Wilayah IEW
  - : Indeks Kondidi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam IFL
4. IKM : Indeks Keberdayaan Masyarakat  
( $IKM = 0,23 \times IKK + 0,53 \times IKM + 0,24 \times ISM$ )
  - : Indeks Kependudukan dan Ketenagakerjaan IKK
  - : Indeks Kesejahteraan Masyarakat IKM
  - : Indeks Kondisi Sosial, Politik dan Budaya ISM

Gambar 3.1 . Penentuan Kriteria dan Bobot Indeks Pembangunan Daerah

Setelah indikator diperoleh dan dilakukan penentuan intensitas / bobotnya.

Sumber : Bappenas 2001, Draft / Rancangan Indeks Pembangunan

Daerah (Regional Development Index), hal 3, dalam Mulyanto

maka perhitungan *rating* atau rangking IPD (Indeks Pembangunan Daerah) di

setiap Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten dapat dilakukan. Intensitas dibuat

berdasarkan skala 1 (satu) hingga 9 (sembilan). Dengan penetapan skala IPD

yang demikian, maka nilai IPD nantinya akan berkisar antara nilai 1 hingga 9; dimana nilai 1 (satu) menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan yang paling rendah, sedangkan nilai 9 (sembilan) menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan yang paling tinggi. Dengan metode perhitungan tersebut, maka diperoleh nilai IPD untuk keseluruhan kecamatan (124 kecamatan) di setiap Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten pada 3 (tiga) periode yang berbeda, yaitu tahun 2001, 2002, dan tahun 2003. Untuk penentuan kategori Indeks menggunakan penghitungan, yaitu T menunjukkan kategori Indeks Tinggi, diperoleh dari nilai di atas *mean* ditambah  $\frac{1}{2}$  dikali *standar deviasi*. S menunjukkan kategori Indeks Sedang, diperoleh dari nilai yang terletak antara nilai *mean* dikurangi  $\frac{1}{2}$  dikali *standar deviasi* sampai nilai *mean* ditambah  $\frac{1}{2}$  dikali *standar deviasi*. R menunjukkan kategori Indeks Rendah, diperoleh dari nilai di bawah *mean* ditambah  $\frac{1}{2}$  dikali *standar deviasi* (Djarwanto PS, 1993).

Pengujian hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan indeks selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, menggunakan analisis varian (uji F), dengan maksud untuk menjelaskan berbagai hal yang berkait ada tidaknya perbedaan mengenai indeks Pembangunan daerah pada setiap Kecamatan di Kabupaten/Kota maupun perbedaan antar Kabupaten/Kota di SUBOSUKAWONOSRATEN selama 3 (tiga) tahun dengan berbagai implementasi kebijakan yang menyertainya. Untuk melakukan uji hipotesis tersebut digunakan rumus sebagai berikut (Djarwanto PS, 1993:173,211):

1) Hipotesis:  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$



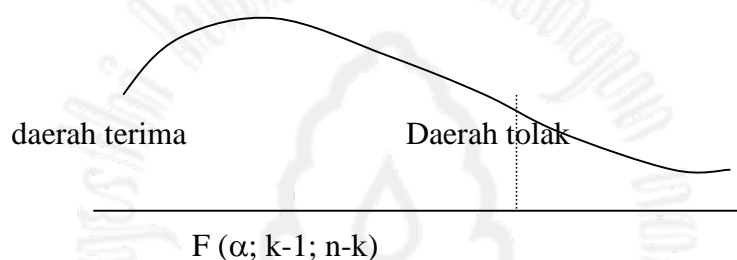
Jika tidak terdapat perbedaan nilai indeks baik pada setiap Kecamatan di Kabupaten/Kota maupun perbedaan antar Kabupaten/Kota di SUBOSUKAWONOSRATEN selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut.

Hipotesis:  $H_0 : \mu_1 \neq \mu_2$

Jika terdapat perbedaan nilai indeks baik pada setiap Kecamatan di Kabupaten/Kota maupun perbedaan antar Kabupaten/Kota di SUBOSUKAWONOSRATEN selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut.

2) Menentukan *level of significance* ( $\alpha$ ) : 0,05

3) Kriteria Pengujian



Jika F Hitung  $\leq$  F Tabel, berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Jika F Hitung  $>$  F Tabel, berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

4) Perhitungan Nilai F

$$F = \frac{\text{Variance between means}}{\text{Variance within groups}}$$

5) Kesimpulan (dengan membandingkan antara langkah 4 dan pengujian pada langkah 3)

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Bila F hitung  $>$  F tabel, maka  $H_0$  ditolak, yang berarti ada perbedaan nilai indeks pembangunan daerah baik pada setiap Kecamatan di Kabupaten/Kota maupun perbedaan antar Kabupaten/Kota di SUBOSUKAWONOSRATEN selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Kawasan Subosuka Wonosraten merupakan sebutan untuk Kawasan Strategis Pertumbuhan di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kawasan ini terdiri dari satu kota yaitu Kota Surakarta, dan enam yaitu Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, dan Klaten. Nama, Subosuka Wonosraten merupakan istilah akronim yang berasal dari ke tujuh kota dan kabupaten di kawasan tersebut. Secara lengkap dan terperinci, pengembangan kawasan strategis menurut fungsinya di Propinsi Jawa Tengah, dapat dikategorikan dalam empat kelompok, yaitu (Bappeda Kabupaten Sragen, 2001: II11-8 - 11-9, dalam Mulyanto, 2002):

##### **1. Kawasan Strategis Pertumbuhan**

- a. Kawasan Subosuka Wonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten).
- b. Kawasan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran [Kota Semarang], Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Purwodadi [Kabupaten Grobogan]).
- c. Kawasan Wanarakuti (Juwana, Jepara, Kudus, dan Pat]). Kawasan Bregas (Brebes, Tegal, dan Slawi).
- d. Kawasan Adilatu (Adipala, Cilacap, dan Buntu).
- e. Kawasan Masatandur (Magelang, Salaman, Muntilan, dan Borobudur).
- f. Kawasan Barlingmascakeb (Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Kebumen)

##### **2. Kawasan Strategis Stagnan**

- a. Kabupaten Blora.
- b. Kabupaten Banjarnegara.
- c. Kabupaten Kebumen.

### **3. Kawasan Konservasi Alam dan Lingkungan Hidup**

- a. Kawasan Gunung Merapi-Merbabu dan sekitarnya, dengan luas 18.908.484 ha.
- b. Kawasan Gunung Sumbing-Sindoro dan sekitarnya, dengan luas 507.709.575 ha.
- c. Kawasan Gunung Slamet dan sekitarnya, dengan luas 214.081.038 ha.
- d. Kawasan Gunung Muria dan sekitarnya, luas 181.988.169 ha
- e. Kawasan Gunung Ungaran dan sekitarnya, dengan luas 53.192.388 ha.
- f. Kawasan Gunung Lawu dan sekitarnya, luas 211.120.540 ha.
- g. Kawasan Gunung Karimunjawa dan sekitarnya, dengan luas 68.425.810 ha

### **4. Kawasan Strategis Perbatasan**

- a. Kawasan Cibening (Cirebon, Brebes, dan Kuningan), wilayah perbatasan antara Propinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat.
- b. Kawasan Gelangmanten (Magelang, Sleman, dan Klaten), wilayah perbatasan antara Propinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Kawasan Karismawirogo (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo) wilayah perbatasan antara Propinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur.
- d. Kawasan Pancimas (Pangandaran, Cilacap dan Banyumas), wilayah

perbatasan antara Propinsi Jawa Tengah dengan Jawa Barat

- e. Kawasan Pawonsari (Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari), wilayah perbatasan antara Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. Kawasan Ratubangnegoro (Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro) wilayah perbatasan antara Propinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur

Di samping pembagian pengembangan kawasan strategis seperti di atas ada pembagian lain yang didasarkan atas wilayah pembangunan. secara lengkap dan terperinci, Wilayah Pembangunan di Propinsi Jawa Tengah dikelompokkan menjadi

10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan, meliputi:

- 1) Wilayah Pembangunan 1, dengan pusatnya di Kota Semarang, yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.
- 2) Wilayah Pembangunan II, dengan pusatnya di Kota Pekalongan, yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang.
- 3) Wilayah Pembangunan III, dengan pusatnya di Kota Tegal, yang meliputi Kota Tegal.
- 4) Wilayah Pembangunan IV, dengan pusatnya di Kota Cilacap, yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Purbalingga.
- 5) Wilayah Pembangunan V, dengan pusatnya di Kota Kebumen, meliputi Kabupaten Kebumen.
- 6) Wilayah Pembangunan VI, dengan pusatnya di Kota Banjarnegara, meliputi Kabupaten Banjarnegara.

- 7) Wilayah Pembangunan VII, dengan pusatnya di Kota Magelang, yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo.
- 8) Wilayah Pembangunan VIII, dengan pusatnya di Kota Surakarta, yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.
- 9) Wilayah Pembangunan IX, dengan pusatnya di Kota Blora, meliputi Kabupaten Blora.
- 10) Wilayah Pembangunan X, dengan pusatnya di Kota Kudus, yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Rembang

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kawasan Subosuka Wonosraten, mempunyai kedudukan yang penting di Propinsi Jawa Tengah, yaitu selain sebagai kawasan strategi pertumbuhan juga merupakan bagian dari wilayah pembangunan, yaitu Wilayah pembangunan VIII. Bagian berikut akan dideskripsikan Daerah penelitian

#### Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah.

Pemaparan letak geografis di kawasan Subosuka Wonosraten akan mencakup masalah letak, batas Daerah, ketinggian, iklim, dan kondisi curah hujan. Sebelum dipaparkan kondisi letak geografis kawasan Subosuka Wonosraten, akan diuraikan terlebih dahulu kondisi letak geografis Propinsi Jawa Tengah. Beberapa kabupaten di kawasan Subosuka Wonosraten berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten-kabupaten tersebut, yaitu: Kabupaten Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, dan Wonogiri. dan. Demikian pula terdapat imlah Kota dan Kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Tengah maupun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY) yang juga berbatasan dengan kawasan Subosuka Wonosraten, yaitu Kabupaten Gunung Kidul atau Wonosari (DIY), Kota Yogyakarta (DIY), Kabupaten Sleman (DIY), Kota Salatiga (Jateng), dan Kabupaten Grobogan atau Purwodadi (Jateng).

Propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi di Pulau Jawa, letaknya diapit oleh 2 (dua) propinsi besar, yaitu Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km ; sedang jarak terjauh dari Utara ke Selatan adalah 226 km (tidak masuk Pulau Karimunjawa). Propinsi Jawa Tengah mempunyai 3.25 juta ha atau sekitar 25,05% dari luas Pulau Jawa atau sekitar 1,70% dari luas Indonesia. Gambaran letak dan karakteristik grafis Propinsi Jawa Tengah

**Tabel 4.1. Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Propinsi Jawa Tengah**

Karakteristik	Uraian/Keterangan
<b>01. Letak</b>	- Antara 108° 30' s/d 111° 30' Bujur Timur, dan antara S° 40' s/d 8° 30' Lintang Selatan
<b>02. Batas</b>	- <b>Berada di tengah-tengah 2 (dua) Propinsi Besar, yaitu Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Timur</b>
<b>03. Iklim</b>	- Suhu udara rata-rata antara 18°C s/d 28°C - Suhu air rata-rata antara 21°C s/d 28°C <b>- kelembaban udara rata-rata antara 73% s/d 94%</b>
<b>04. Hujan</b>	- Curah hujan tertinggi sebesar 3.990 mm (di Stasiun Iklim Wadaslintang Wonosobo) - Hari hujan terbanyak 195 hari (di Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus, Getas Salatiga)

Sumber: Bappeda-BPS Jawa Tengah. (2003). **Jawa Tengah Dalam Angka 2003.**

Dalam memaparkan kondisi di kawasan Subosuka Wonosraten, akan dimulai dari Kota Surakarta, yang dilanjutkan dengan kondisi letak geografis di 6 (enam) kabupaten lain secara berurutan, yaitu Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, ), Wonogiri dan terakhir Kabupaten Klaten.

## 1. Kota Surakarta

### a. Keadaan Geografis

Di antara 7 (tujuh) Daerah di kawasan Subosuka Wonosraten, Surakarta merupakan satu-satunya Daerah yang berbentuk Perkotaan. Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan sebutan Kota Solo, merupakan dataran rendah dan berada antara pertemuan kali/sungai Pepe dan Jenes dengan Bengawan Solo.

**Tabel 4.2. Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kota Surakarta**

Karakteristik	Uraian/Keterangan
<b>01. Letak</b>	- antara 110° 45' 15" s/d 110° 45' 35" Bujur Timur dan antara 7° 36' 00" s/d 7° 56' 00" Lintang Selatan
<b>02. Batas</b>	- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo. - <b>Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar</b> - <b>Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar dan Boyolali</b> - <b>Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar</b>
<b>03. Ketinggian</b>	- Kota Surakarta mempunyai ketinggian rata-rata sebesar 92 m di atas permukaan air laut.
<b>04. Iklim</b>	- suhu udara rata-rata antara 21,9°C s/d 32,5°C. - rata-rata tekanan udara sekitar 1.010,9 MBS. - kelembaban udara rata-rata antara 71%. - kecepatan angin sekitar 04 knot.

Sumber: Bappeda-BPS Kota Surakarta. (2003). **Surakarta Dalam Angka 2003.**

### b. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di wilayah Kota Surakarta berdasarkan hasil registrasi pada akhir tahun 2003 tercatat sebesar 555.395 jiwa yang terdiri dari 273.516 laki-laki dan 281.879 perempuan. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 4.403 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduknya sebesar 11.291 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk di Kota Surakarta tersebar dalam 5 (lima) Kecamatan dan 51 Kelurahan. Sebagian besar penduduk bekerja pada Sektor Perdagangan. Selain pada Sektor Perdagangan, penduduk Kota Surakarta juga bekerja pada Sektor Industri dan Sektor jasa..

**Tabel 4.3. Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2003**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa per km <sup>2</sup> )
1.	Serengan	8,64	108.009	11	10240
2.	Laweyan	3,19	61.294	7	14659
3.	Jebres	4,82	85.923	9	15869
4.	Pasar Kliwon	12,58	137.449	11	10442
5.	Banjarsari	14,81	162.090	13	10424
	<b>Jumlah</b>	<b>44.04</b>	<b>555.395</b>	<b>51</b>	<b>11291</b>

Sumber: Bappeda-BPS Kota Surakarta. (2003). **Surakarta Dalam Angka 2003.**

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Sejak peristiwa kerusuhan di Kota Surakarta perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Salah satu indikator yang mengisyaratkan hal itu adalah laju pertumbuhan ekonomi yang positif selama 4 (empat) tahun berturut-turut (tahun 2000, 2001, 2002, 2003). Dari hasil



perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Kota Surakarta tahun 2003 sebesar Rp 1.518.008,05 juta, yang berarti mengalami kenaikan sekitar 6,4% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.425.961,17 juta.

Pertumbuhan sektor ekonomi tertinggi dialami oleh Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran yang dapat menyumbangkan kontribusi terbesar pada sektor ekonomi Kota Surakarta sebesar 22,13%., sedangkan sektor yang kontribusinya terkecil adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,06% dan Sektor Pertanian sebesar 1,5%.

#### **d. PDRB Per Kapita**

PDRB Perkapita atas dasar harga konstan sebagai salah satu indikator kemakmuran rakyat Kota Surakarta yang berpenduduk 555.395 jiwa pada tahun 2003 mencapai Rp 3.104.514,10 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2.903.775,98. Pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2003 adalah sebesar 6,9%.

Angka ini sebenarnya sebagai gambaran pendapatan perkapita. Hal ini karena pendapatan perkapita secara riil sangat sulit dihitung mengingat bahwa sebagian nilai tambah Kabupaten Sukoharjo juga dinikmati oleh penduduk Kabupaten di sekitar kota, seperti Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Begitu pula sebaliknya, sebagian nilai tambah dari luar kabupaten dinikmati oleh penduduk Kota Surakarta

#### **e. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan**

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Surakarta pada tahun 2000 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 16,5%. Tahun 2001 sampai

2003 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yaitu sebesar 12% pada tahun 2001, sebesar 11,49% pada tahun 2002 dan pada tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi sebesar 12,46%.

Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan Tahun Dasar 1993 perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif pada. Tahun 1999 PDRB Kota Surakarta mengalami pertumbuhan ekonomi yang terkecil sebesar 1,14%. Tahun 2000 mengalami kenaikan pertumbuhan 4,15%. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan tetapi pertumbuhannya menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,92%. Tahun 2002 mengalami pertumbuhan meningkat sebesar 5,32% sampai tahun 2003 yang pertumbuhannya terbesar yaitu sebesar 10,66%

Tabel 4.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kota Surakarta Tahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1999	2.545.175,03	12,07	1.250.807,41	1,14
2000	2.965.128,91	16,5	1.302.715,92	4,15
2001	3.321.685,50	12	1.353.882,64	3,92
2002	3.703.510,33	11,49	1.425.961,17	5,32
2003	4.177.490,76	12,46	1.518.008,05	10,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 1994-2003. **Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta 1999-2003.**

## 2. Kabupaten Boyolali

### a. Keadaan Geografis

Sebagaimana Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali merupakan salah satu dari 35 Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah. Jarak bentang terjauh dari Barat ke Timur adalah 48 km, sedang dari Utara ke Selatan adalah 54 km. Jenis perairan yang ada di Kabupaten Boyolali berasal

dari 3 (tiga) sumber, yaitu: sumber air dangkal, waduk, dan sungai. Khusus di Kecamatan Selo, Cepogo, dan Ampel berdekatan dengan 2 (dua) buah gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kabupaten Boyolali dikenal dengan simbol hewan ternak sapi, yang selain sebagai sumber daging dikenal juga sebagai daerah pemerahan susu sapi

**Tabel 4.5. Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Boyolali**

Karakteristik	Uraian/Keterangan
<b>01. Letak</b>	- antara 110° 22' s/d 110° 50' Bujur Timur, dan antara 7° 36' s/d 7° 71' Lintang Selatan
<b>02. Batas</b>	- Sebelah Selatan : Kabupaten Klaten dan Sleman (DIY) - <b>Sebelah Barat</b> : <b>Kabupaten Magelang dan Semarang</b> - <b>Sebelah Utara</b> : <b>Kabupaten Grobogan dan Semarang</b> - <b>Sebelah Timur</b> : <b>Kabupaten Karanganyar, Sragen dan Sukoharjo</b>
<b>03. Ketinggian</b>	- Kabupaten Boyolali mempunyai ketinggian antar 75 s/d 1.500 m di atas permukaan air laut
<b>04. Perairan</b>	- Air Dangkal Kecamatan Boyolali. a. Tlatar Kecamatan Teras. b. Nepen Kecamatan Banyudono. c. Pengging kecamatan Ampel. d. Pantaran - Waduk a. Kedungombo Kecamatan Kemusu, seluas ± 3.536 ha b. Kedungdowo Kecamatan Andong, seluas ± 48 ha c. Cengklik Kecamatan Ngemplak, seluas ± 240 ha d. Bade Kecamatan Klego, seluas ± 80 ha

Sumber: Bappeda-BPS Kabupaten Boyolali. (2003). **Boyolali Dalam Angka 2003**.

### **b. Keadaan Penduduk**

Keadaan penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali berdasarkan hasil registrasi pada akhir tahun 2003 tercatat sebesar 935.768 jiwa yang terdiri dari 457.389 laki-laki dan 478.379 perempuan. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1015,10 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk sebesar

921 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk di Kabupaten Boyolali tersebar dalam 19 (Sembilan belas) Kecamatan yang terdiri 253 Desa dan 4 Kelurahan Sebagian besar penduduk bekerja pada Sektor Pertanian. Selain pada Sektor Pertanian, penduduk Kabupaten Boyolali juga bekerja pada Sektor Industri dan Sektor jasa..

**Tabel 4.6. Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Boyolali Tahun 2003**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kelurahan/ Desa	Kepadatan Penduduk (Jiwa per km <sup>2</sup> )
1.	Selo	56,07	26491	10	472
2.	Ampel	90,31	68825	20	761
3.	Cepogo	52,99	51487	15	971
4.	Musuk	65,04	59480	20	915
5.	Boyolali	26,25	57307	9	2183
6.	Mojosongo	43,41	50853	13	1171
7.	Teras	29,93	44107	13	1473
8.	Sawit	17,23	32393	12	1880
9.	Banyudono	25,37	45039	15	1775
10.	Sambi	46,49	48168	16	1063
11.	Ngemplak	38,57	68325	12	1773
12.	Nogosari	55,08	61325	13	1113
13.	Simo	48,04	42952	13	894
14.	Karanggede	41,75	40721	13	975
15.	Klego	51,87	45524	16	878
16.	Andong	54,52	60602	16	1111
17.	Kemusu	99,08	45536	18	460
18.	Wonosegoro	92,99	53032	10	570
19.	Juwangi	79,99	33601	13	420
	<b>Jumlah</b>	<b>1015,10</b>	<b>935738</b>	<b>267</b>	<b>921</b>

Sumber: Bappeda-BPS Kabupaten Boyolali. (2003). **Boyolali Dalam Angka 2003.**

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Boyolali menunjukkan pertumbuhan yang positif Salah satu indikator yang mengisyaratkan hal itu adalah laju

pertumbuhan ekonomi yang positif selama 4 (empat) tahun berturut-turut (tahun 2000, 2001, 2002, 2003). Dari hasil perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Kabupaten Boyolali tahun 2003 sebesar Rp 1.041.873,57 juta, yang berarti mengalami kenaikan sekitar 15,4% dari tahun 2000 sebesar Rp 902.682,45 juta.

Pertumbuhan sektor ekonomi tertinggi dialami oleh Sektor Pertanian yang dapat menyumbangkan kontribusi terbesar pada sektor ekonomi Kabupaten Boyolali sebesar Rp.322.206,11 juta sedangkan sektor yang kontribusinya terkecil adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 5.322,81 juta dan Sektor Bangunan sebesar 30.021,40 juta.

#### **d. PDRB Per Kapita**

PDRB Perkapita atas dasar harga konstan sebagai salah satu indikator kemakmuran rakyat Kabupaten Boyolali yang berpenduduk 555.395 jiwa pada tahun 2003 mencapai Rp 1.116.376,04 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.062.163,85. Pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2003 adalah sebesar 5.1%.

Sedangkan untuk PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 1.116.376,04 atau rata-rata perbulan sebesar Rp 93.031,34 lebih tinggi dari tahun 2002 Rp 1.500.554,58 atau rata-rata perbulan sebesar Rp 125.046,2.

#### **e. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan**

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Boyolali pada tahun 2001 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 17,8%. Tahun 2000 sampai 2003 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yaitu sebesar 11,6% pada tahun 2000, sebesar 11,49% dan pada tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi sebesar 7.2%.

Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan Tahun Dasar 1993 perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif pada. Tahun 1999 PDRB Kabupaten Boyolali mengalami pertumbuhan ekonomi yang terkecil yaitu 1,18%. Tahun 2000 mengalami kenaikan pertumbuhan 2,05%. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan yaitu sebesar 3,63%. Tahun 2002 mengalami pertumbuhan meningkat sebesar 5,52% sampai tahun 2003 yang pertumbuhannya terbesar yaitu sebesar 5,54%.

Tabel 4.7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Boyolali Tahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1999	2261346.58	12,07	884481.69	1,18
2000	2524024.49	11,6	902682.45	2,05
2001	2972852.79	17.78	935467.99	3.63
2002	3362795.58	13.16	987113.46	5,52
2003	3605349.13	7,2	1041873.57	5,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 1994-2003. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Boyolali 1999-2003.**

### 3. Kabupaten Sukoharjo

#### a. Keadaan Geografis

Seperti yang di bagian nanti akan dijelaskan, Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah yang tergolong kecil (sekitar 466,66 km) dibanding dengan luas wilayah kabupaten lain di kawasan Subosuka Wonosraten.

**Tabel 4.8. Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Sukoharjo**

Karakteristik	Uraian/Keterangan
<b>01. Letak</b>	- antara 110° 42' 06,79" s/d 110° 57' 33,70" Bujur Timur, dan antara 7° 32' 17,00" s/d 7° 49' 32,00" Lintang Selatan
<b>02. Batas</b>	- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Gunung Kidul - Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Klaten. - Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Karanganyar - Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar.
<b>03. Ketinggian</b>	- Kabupaten Sukoharjo mempunyai ketinggian antara 89 (Kecamatan Grogol s/d 125 (Kecamatan Polokarto) di atas permukaan air laut
<b>04. Hujan</b>	- Banyaknya hari hujan rata-rata per tahun adalah 108 hari - Tinggi curah hujan rata-rata per tahun sebesar 264 mm

Sumber: Bappeda-BPS Kabupaten Sukoharjo (2003). **Sukoharjo Dalam Angka 2003**.

#### **b. Keadaan Penduduk**

Keadaan penduduk di wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil registrasi pada akhir tahun 2003 tercatat sebesar 808.811 jiwa yang terdiri dari 399.290 laki-laki dan 409.521 perempuan. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 466.26 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk sebesar 1734 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk di Kabupaten Sukoharjo tersebar dalam 12 (Dua belas) Kecamatan yang terdiri 150 Desa dan 17 Kelurahan Sebagian besar penduduk bekerja pada Sektor Pertanian dan Industri. Sedangkan yang paling kecil penduduk Kabupaten Sukoharjo bekerja pada Sektor Keuangan dan Komunikasi.

**Tabel 4.9. Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003**



No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kelurahan/ Desa	Kepadatan Penduduk (Jiwa per km <sup>2</sup> )
1.	Weru	41,98	65896	13	1565
2.	Bulu	43,86	51423	12	1472
3.	Tawang Sari	39,98	57401	12	1436
4.	Sukoharjo	44,58	80023	14	1795
5.	Nguter	54,48	69194	16	1270
6.	Bendosari	52,99	64180	14	1211
7.	Polokarto	62,18	71867	17	1156
8.	Mojolaban	35,54	74113	15	2085
9.	Grogol	30,00	95563	14	3185
10.	Baki	21,97	50828	14	2314
11.	Gatak	19,47	46221	14	2374
12.	Kartasura	19,23	86412	12	4494
	<b>Jumlah</b>	<b>466,26</b>	<b>808.811</b>	<b>167</b>	<b>1734</b>

Sumber: Bappeda-BPS Kabupaten Sukoharjo. (2003). **Sukoharjo Dalam Angka 2003.**

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan pertumbuhan yang positif. Salah satu indikator yang mengisyaratkan hal itu adalah laju pertumbuhan ekonomi yang positif selama 4 (empat) tahun berturut-turut (tahun 2000, 2001, 2002, 2003). Dari hasil perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Kabupaten Sukoharjo tahun 2003 sebesar Rp 1.242.3325,13 juta, yang berarti mengalami kenaikan sekitar 11,6% dari tahun 2000 yang sebesar Rp 1.112.920,80 juta.

Pertumbuhan sektor ekonomi tertinggi dialami oleh Sektor Pertanian yang dapat menyumbangkan kontribusi terbesar pada sektor ekonomi Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp.240.395,50 juta sedangkan sektor yang kontribusinya terkecil adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Minum 17.944,69 juta dan Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 18.948,46 juta.



#### **d. PDRB Per Kapita**

PDRB Perkapita sebagai salah satu indikator kemakmuran rakyat Kabupaten Sukoharjo yang berpenduduk 808.811 jiwa pada tahun 2003 mencapai Rp 1.541.420,77 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.500.554,58. Pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2003 adalah sebesar 2,7%.

Sedangkan untuk PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2002 adalah sebesar Rp 4.465334.36 atau rata-rata perbulan sebesar Rp 372.111,19 lebih tinggi dari tahun 2002 yaitu Rp 4.071212,54 atau rata-rata perbulan sebesar Rp 339.267,71.

#### **e. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan**

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2001 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 14,47%. Tahun 2000 sampai 2003 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yaitu sebesar 11,39% pada tahun 2000, dan pada tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi sebesar 10,62%.

Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan Tahun Dasar 1993 perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif pada. Tahun 1999 PDRB Kabupaten Sukoharjo mengalami pertumbuhan ekonomi yang terkecil yaitu 1,25%. Tahun 2000 mengalami kenaikan pertumbuhan 3,52%. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan yaitu sebesar 4,05%. Tahun

2002 mengalami pertumbuhan meningkat sebesar 3,58% sampai tahun 2003 yang pertumbuhannya terbesar yaitu sebesar 3,59%.

Tabel 4.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Sukoharjo Tahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1999	2257658.59	9.35	1074922.61	1.25
2000	2514889.89	11.39	1112790.8	3.52
2001	2878709.93	14.47	1157846.99	4.05
2002	3253135.2	13.01	1199288.24	3.58
2003	3598724.59	10.62	1242325.13	3.59

Sumber: Badan Pusat Statistik Karanganyar, 1994-2003. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukoharjo 1999-2003.**

#### 4. Kabupaten Karanganyar

##### a. Keadaan Geografis

Kabupaten Karanganyar merupakan kabupaten yang letaknya diapit oleh Kabupaten Sragen, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, serta berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur.

Tabel 4.11. Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Karanganyar

Karakteristik	Uraian/Keterangan
<b>01. Letak</b>	- antara 110° 40' s/d 110° 70' Bujur Timur, dan antara 7° 28' s/d 7° 46' Lintang Selatan
<b>02. Batas</b>	- <b>Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo</b> - <b>Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali.</b> - <b>Sebelah Utara : Kabupaten Sragen</b> - <b>Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur..</b>
<b>03. Ketinggian</b>	- Kabupaten Karanganyar mempunyai ketinggian rata-rata sebesar 511
<b>04. Iklim</b>	- Kabupaten Karanganyar beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 22°C s/d 31°C.
<b>05. Hujan</b>	- Kabupaten Karanganyar mempunyai hari hujan rata-rata dalam satu tahun sebanyak 88 hari dengan curah hujan sebesar 2.101 mm.

Sumber: Bappeda-BPS Kabupaten Karanganyar (2003). **Karanganyar Dalam Angka 2003.**

### b. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di wilayah Kabupaten Karanganyar berdasarkan hasil registrasi pada akhir tahun 2003 tercatat sebesar 823.203 jiwa yang terdiri dari 407.547 laki-laki dan 415.656 perempuan. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 773.78 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk sebesar 1063 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk di Kabupaten Karanganyar tersebar dalam 17 (tujuh belas) Kecamatan yang terdiri 162 Desa dan 15 Kelurahan. Sebagian besar penduduk bekerja pada Sektor Pertanian dan Industri. Sedangkan yang paling kecil penduduk Kabupaten Karanganyar bekerja pada Sektor Keuangan dan dan pertambangan dan galian.

**Tabel 4.12. Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2003**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kelurahan/ Desa	Kepadatan Penduduk (Jiwa per km <sup>2</sup> )
1.	Jatipuro	40.36	37425	10	927
2.	Jatiyoso	67.16	39638	9	590
3.	Jumapolo	55.67	45999	11	826
4.	Jumantono	53.55	46944	12	876
5.	Matesih	26.26	44370	9	1664
6.	Tawangmangu	70.03	44132	10	630
7.	Ngargoyoso	65.33	34296	9	927
8.	Karangpandan	34.11	41006	11	1202
9.	Karanganyar	43.02	71461	12	1661
10.	Tasikmadu	27.59	53843	10	1951
11.	Jaten	25.54	67170	8	2629
12.	Colomadu	15.64	52402	11	3350
13.	Gondangrejo	56.79	63287	13	1114
14.	Kebakkramat	36.45	56311	10	1544
15.	Mojogedang	53.30	61514	13	1154

16.	Kerjo	46.82	36530	10	7187
17.	Jenawi	56.08	26875	9	479
	<b>Jumlah</b>	<b>773.78</b>	<b>823.203</b>	<b>177</b>	<b>1063</b>

Sumber: Bappeda-BPS Kabupaten Karanganyar (2003). **Karanganyar Dalam Angka 2003.**

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Karanganyar menunjukkan pertumbuhan yang positif. Salah satu indikator yang mengisyaratkan hal itu adalah laju pertumbuhan ekonomi yang positif selama 4 (empat) tahun berturut-turut (tahun 2000, 2001, 2002, 2003). Dari hasil perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Kabupaten Karanganyar tahun 2003 sebesar Rp 1.290.163,05 juta, yang berarti mengalami kenaikan sekitar 89% dari tahun 2000 yang sebesar Rp 1.193.085,08 juta.

Pertumbuhan sektor ekonomi tertinggi dialami oleh Sektor Industri yang dapat menyumbangkan kontribusi terbesar pada sektor ekonomi Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.1.416.666.66 juta sedangkan sektor yang kontribusinya terkecil adalah Sektor Pertambangan dan Galian Rp. 46.218 juta dan Sektor Bangunan sebesar 72.804 juta.

#### **d. PDRB Per Kapita**

PDRB Perkapita sebagai salah satu indikator kemakmuran rakyat Kabupaten Karanganyar yang berpenduduk 823.203 jiwa pada tahun 2003 mencapai Rp 1.576921.49 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.541.420,77. Pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2003 adalah sebesar 2,3%.

Sedangkan untuk PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 4.300.553,43 atau rata-rata perbulan sebesar Rp 358.379.5 lebih tinggi dari tahun 2002 yaitu Rp 3.902.438.25 atau rata-rata perbulan sebesar Rp 325.203.2.

#### **e. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan**

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2001 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 14,31%. Tahun 2000 sampai 2003 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yaitu sebesar 11,12% pada tahun 2000, dan pada tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi sebesar 10,93%.

Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan Tahun Dasar 1993 perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif pada. Tahun 1999 PDRB Kabupaten Karanganyar mengalami pertumbuhan ekonomi yang terkecil yaitu 2,90%. Tahun 2000 mengalami kenaikan pertumbuhan 3,32%. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan yaitu sebesar 3.78%. Tahun 2002 mengalami pertumbuhan meningkat sebesar 3,42% sampai tahun 2003 yang pertumbuhannya terbesar yaitu sebesar 3,45%.

Tabel 4.13. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Karanganyar Tahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1999	2312932.52	6.58	1141544.82	2.90
2000	2541783.09	11.12	1193085.08	3.32
2001	2812235.12	14.31	1210084.81	3.78
2002	3161318.4	13.31	1248686.47	3.42
2003	3518336.68	10.93	1290163.05	3.45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Karanganyar, 1994-2003. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karanganyar 1999-2003.**

## 5. Kabupaten Wonogiri

### a. Keadaan Geografis

Nama Wonogiri berasal dari kata 'WONO' yang berarti hutan dan 'GIRI' yang berarti gunung. Sebagaimana kabupaten dan kota di kawasan **Subosuka Wonosraten**, Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu dari 29 kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Jarak dari Kabupaten Wonogiri dengan Kota Surakarta sekitar 32 km. Sedang jarak dari Kabupaten Wonogiri dengan kota Semarang kurang lebih sekitar 133 km.

Tabel 4.14. Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Wonogiri

Karakteristik	Uraian/Keterangan
<b>01. Letak</b>	- antara 110° 41' s/d 111° 18' Bujur Timur, dan antara 7° 32' s/d 8° 15' Lintang Selatan
<b>02. Batas</b>	- <b>Sebelah Selatan : Kab. Pacitan (Jatim) dan Samudera Indonesia.</b> - <b>Sebelah Barat : Kab. Wonosari / Daerah Istimewa Yogyakarta.</b> - <b>Sebelah Utara : Kab. Sukoharjo dan Karanganyar</b> - <b>Sebelah Timur : Kab. Karanganyar dan Kab. Ponorogo (Jatim).</b>
<b>03. Ketinggian</b>	- Kabupaten Wonogiri mempunyai ketinggian antara 106 m (Kecamat. Selogiri) s/d 535 m (Kecamatan Jatiroto) di atas permukaan air laut.

<b>04. Iklim</b>	- Kabupaten Wonogiri beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata antara 24°C s/d 32°C
<b>05. Hujan</b>	- Kabupaten Wonogiri mempunyai hari hujan dalam satu tahun sebanyak 234 hari dengan curah hujan sebesar 3.757 mm

Sumber: Bappeda-BPS Kabupaten Wonogiri (2003). **Wonogiri Dalam Angka 2003.**

#### b. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di wilayah Kabupaten Wonogiri berdasarkan hasil registrasi pada akhir tahun 2003 tercatat sebesar 1.112.825 jiwa. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1822 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk sebesar 610 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk di Kabupaten Wonogiri tersebar dalam 25 (dua puluh lima) Kecamatan, yang sebelumnya hanya 24 tetapi pada tahun 2002 bertambah satu kecamatan yaitu Puhpelem dengan dikeluarkannya Perda No 3 Tahun 2002. dari 25 kecamatan tersebut terbagi menjadi 251 Desa dan 43 Kelurahan. Sebagian besar penduduk bekerja pada Sektor Pertanian dan Perdagangan. Sedangkan yang paling kecil penduduk Kabupaten Wonogiri bekerja pada Sektor Keuangan dan Listrik, gas dan air minum.

**Tabel 4.15. Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2003**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kelurahan/ Desa	Kepadatan Penduduk (Jiwa per km <sup>2</sup> )
1	Pracimantoro	142,14	66477	18	467
2	Paranggupito	64,75	20767	8	321
3	Giritontro	61,63	24649	7	400
4	Giriwoyo	100,60	47197	16	469
5	Batuwarno	51,65	21307	8	412
6	Karangtengah	84,59	24397	5	288
7	Tirtomoyo	93,01	56236	14	605
8	Nguntoronadi	80,40	27805	23	345
9	Baturetno	89,10	51191	29	574



10	Eromoko	120,35	49113	23	408
11	Wuryantoro	72,60	31113	33	431
12	Manyaran	81,64	41664	8	510
13	Selogiri	50,17	53667	7	595
14	Wonogiri	82,92	85858	11	1035
15	Ngadirojo	93,25	58880	15	631
16	Sidoharjo	57,19	47014	11	823
17	Jatiroto	62,77	42751	12	681
18	Kismantoro	69,86	39301	10	563
19	Purwantoro	59,52	58502	15	983
20	Bulukerto	40,51	35733	10	882
21	Puhpelem	31,61	21015	8	667
22	Slogohimo	64,14	53014	17	827
23	Jatisrono	50,02	66627	17	1332
24	Jatipurno	55,46	39913	11	720
25	Girimarto	62,36	48326	14	718
	<b>Jumlah</b>	<b>1822,36</b>	<b>1112825</b>	<b>294</b>	<b>610</b>

Sumber: Bappeda-BPS Kabupaten Wonogiri. (2003). **Wonogiri Dalam Angka 2003.**

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Wonogiri menunjukkan pertumbuhan yang positif. Salah satu indikator yang mengisyaratkan hal itu adalah laju pertumbuhan ekonomi yang positif selama 4 (empat) tahun berturut-turut (tahun 2000, 2001, 2002, 2003). Dari hasil perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2003 sebesar Rp 861.009,82 juta, yang berarti mengalami kenaikan sekitar 89% dari tahun 2000 yang sebesar Rp 783586.68 juta.

Pertumbuhan sektor ekonomi tertinggi dialami oleh Sektor Pertanian yang dapat menyumbangkan kontribusi terbesar pada sektor ekonomi Kabupaten Wonogiri sebesar Rp.390.936,68 juta sedangkan sektor yang kontribusinya terkecil adalah Sektor Pertambangan dan Galian Rp. 9708,17 juta dan Sektor Listrik gas, dan Air Minum sebesar Rp. 8293,74 juta.

### d. PDRB Per Kapita



PDRB Perkapita sebagai salah satu indikator kemakmuran rakyat Kabupaten Wonogiri yang berpenduduk 1.112.825 jiwa pada tahun 2003 mencapai Rp 775.941,77 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 745.597,19 Pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2003 adalah sebesar 4,06%.

Sedangkan untuk PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 2.499.412,24 atau rata-rata perbulan sebesar Rp 208.284,4 lebih tinggi dari tahun 2002 yaitu Rp 2.234.072,04 atau rata-rata perbulan sebesar Rp 186.172,7.

#### **e. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan**

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2001 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 17.63%. Tahun 2000 sampai 2003 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yaitu sebesar 13,80% pada tahun 2000, dan pada tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi sebesar 13,82%.

Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan Tahun Dasar 1993 perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif pada Tahun 2000 PDRB Kabupaten Wonogiri mengalami pertumbuhan ekonomi yang terkecil yaitu 5%. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan yaitu sebesar 5.75%. Tahun 2002 mengalami pertumbuhan meningkat sebesar 5.15% sampai tahun 2003 yang pertumbuhannya terbesar yaitu sebesar 5.16%

Tabel 4.16. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Wonogiri Tahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1999	1864024.15	16.26	756802.53	9.75
2000	2063170.07	13.80	783586.68	5
2001	2245387.53	17.63	804087.16	5.75
2002	2500706.3	16.68	834583.47	5.15
2003	2773427.8	13.82	861009.82	5.16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Wonogiri, 1994-2003. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonogiri 1999-2003.**

## 6. Kabupaten Sragen

### a. Keadaan Geografis

Di kawasan **Subosuka Wonosraten**, Kabupaten Sragen sebagaimana yang nanti akan dijelaskan, mempunyai luas wilayah nomor 3 (tiga) setelah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Boyolali. Kabupaten Sragen secara umum terletak di dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian dari permukaan laut sebesar 109 m, serta merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Timur.

**Tabel 4.17. Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Sragen**

Karakteristik	Uraian/Keterangan
<b>01. Letak</b>	- antara 1 10° 45' s/d 1 11° 10' Bujur Timur, dan antara 7° 15' s/d 7° 30' Lintang Selatan
<b>02. Batas</b>	: Kabupaten Karanganyar.           Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali.           Sebelah Barat Kabupaten Grobogan. Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur. Sebelah Timur :
<b>03. Ketinggian</b>	- Kabupaten Sragen mempunyai ketinggian rata-rata 109 m di atas permukaan air laut, dengan standar deviasi sebesar 50 m..
<b>04. Iklim</b>	- Kabupaten Sragen beriklim tropis dan bersuhu sedang
<b>05. Hujan</b>	- Kabupaten Sragen mempunyai hari hujan dalam satu tahun dengan rata di bawah 150 hari dengan curah hujan rata-rata

	di bawah 3.000 mm per tahun
--	-----------------------------

Sumber: Bappeda-BPS Kabupaten Sragen(2003). **Sragen Dalam Angka 2003.**

### b. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di wilayah Kabupaten Sragen berdasarkan hasil registrasi pada akhir tahun 2003 tercatat sebesar 853.711 jiwa. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 941.55 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk sebesar 906,70 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk di Kabupaten Sragen tersebar dalam 20 (dua puluh) Kecamatan dan terbagi menjadi 200 Desa dan 6 Kelurahan. Sebagian besar penduduk bekerja pada Sektor Pertanian dan Perdagangan. Sedangkan yang paling kecil penduduk Kabupaten Sragen bekerja pada Sektor Keuangan dan Listrik, gas dan air minum.

**Tabel 4.18. Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen Tahun 2003**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kelurahan/ Desa	Kepadatan Penduduk (Jiwa per km <sup>2</sup> )
1	Kalijambe	46,96	45208	14	963
2	Plupuh	48,36	45225	16	936
3	Masaran	44,04	64631	13	1468
4	Kedawung	49,78	55045	10	1106
5	Sambirejo	48,43	36864	9	761
6	Gondang	41,17	42520	9	1033
7	Sambungmacan	38,48	43549	9	1132
8	Ngrampal	34,40	36842	8	1071
9	Karangmalang	42,98	56890	10	1324
10	Sragen	27,27	64607	8	2369
11	Sidoarjo	45,89	50595	12	1103
12	Tanon	51,00	54108	10	1061
13.	Gemolong	21,38	44430	14	2078
14	Miri	53,81	32188	9	598
15	Sumberlawang	75,16	44579	11	593
16	Mondokan	49,36	33610	9	681
17	Sukodono	45,55	29949	9	657
18	Gesi	39,58	20404	7	516
19	Tangen	55,13	26330	7	478
20	Jenar	63,97	26107	7	408

		<b>Jumlah</b>	<b>941,55</b>	<b>853711</b>	<b>206</b>
--	--	---------------	---------------	---------------	------------

Sumber: Bappeda-BPS Kabupaten Sragen. (2003). **Sragen Dalam Angka 2003.**

### **c. Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian di Kabupaten Sragen menunjukkan pertumbuhan yang positif. Salah satu indikator yang mengisyaratkan hal itu adalah laju pertumbuhan ekonomi yang positif selama 4 (empat) tahun berturut-turut (tahun 2000, 2001, 2002, 2003). Dari hasil perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Kabupaten Sragen tahun 2003 sebesar Rp 757.392,36 juta, yang berarti mengalami kenaikan sekitar 3,4% dari tahun 2000 yang sebesar Rp 732.275,77 juta.

Pertumbuhan sektor ekonomi tertinggi dialami oleh Sektor Pertanian yang dapat menyumbangkan kontribusi terbesar pada sektor ekonomi Kabupaten Wonogiri sebesar Rp.251.822,52 juta sedangkan sektor yang kontribusinya terkecil adalah Sektor Pertambangan dan Galian Rp. 16.392,52 juta dan Sektor Listrik gas, dan Air Minum sebesar Rp. 11.911,39 juta.

### **d. PDRB Per Kapita**

PDRB Perkapita sebagai salah satu indikator kemakmuran rakyat Kabupaten Sragen yang berpenduduk 853711 jiwa pada tahun 2003 mencapai Rp. 888.280,49 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 861.090,62. Pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2003 adalah sebesar 3.15%.

Sedangkan untuk PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 2.718.978,10 atau rata-rata perbulan sebesar

Rp 226.581,5 lebih tinggi dari tahun 2002 yaitu Rp 2.475.475.15 atau rata-rata perbulan sebesar Rp 206.289.06.

#### e. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Sragen pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 10,13%. Tahun 2000 sampai 2002 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yaitu sebesar 7,30% pada tahun 2000, dan pada tahun 2002 mengalami kenaikan menjadi sebesar 9.89%.

Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan Tahun Dasar 1993 perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif pada Tahun 1999 PDRB Kabupaten Sragen mengalami pertumbuhan ekonomi yang terkecil yaitu 1,98%. Pada tahun 2000 terjadi peningkatan yaitu sebesar 2.85%. Tahun 2001 mengalami pertumbuhan meningkat sebesar 2,26% sampai tahun 2003 yang pertumbuhannya terbesar yaitu sebesar 3.26%

Tabel 4.19. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Sragen Tahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1999	1639021,30	7,47	677594,02	1,98
2000	1758649,46	7,30	696930,14	2,85
2001	1915755,96	8,93	712656,17	2,26
2002	2105156,40	9,89	733504,97	2,93
2003	2318336,68	10,13	757.392,37	3,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Sragen, 1994-2003. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen 1999-2003.**

## 7. Kabupaten Klaten

### a. Keadaan Geografis

Daerah Kabupaten Klaten terbentang di antara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, yang dilewati jalan raya YogyaSolo, sehingga mempunyai peranan yang penting dalam memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Di samping Daerah pertengahan (mediterania) antara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta atau Kota Solo, masih terdapat pula beberapa obyek wisata, misalnya:

- 1) Candi, misalnya Candi Sewu, Candi Plaosan, Candi Sojiwan, Candi Merak, dan Candi Bubrah yang terletak di kecamatan Prambanan.
- 2) Makam, misalnya Makam Ki Ageng Pandanaran (Kecamatan Bayat), Makam Ki Ageng RM Ronggowarsito (Kecamatan Trucuk), Makam Ki Ageng Perwito (Kecamatan Wonosari), Makam Ki Ageng Gribig (Kecamatan Jatinom)
- 3) Pemandian, misalnya Pemandian Tirtomulyono (Kecamatan Kebonarum), Pemandian Jolotundo dan Ponggok (Kecamatan Jatinom), Pemandian Sumber Ingas dan Lombangtirto (Kecamatan Tulung).
- 4) Lainnya, Musium Gula Jawa Tengah (Kecamatan Jogonalan), Wisata Peman-cingan Janti (Kecamatan Polanharjo), Wisata Pemandangan Deles Indah (Kecamatan Pemalang), Wisata Danau/Rowo Jombor (Kecamatan Bayat), dan sebagainya.

Secara umum wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari 3 (tiga) dataran, yaitu dataran lereng gunung merapi, dataran rendah, dan dataran gunung

kapur; yang selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Dataran Lereng Gunung Merapi. Dataran ini membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara Kecamatan Kemalang,

Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.

- 2) Dataran Rendah membujur di tengah-tengah meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran Lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
- 3) Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan, meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.
- 4) Dengan melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah Dataran Rendah, maka Kabupaten Klaten merupakan Daerah pertanian yang potensial. Di samping itu juga sebagai penghasil kapur, batu kali dan pasir dari sungai yang berasal dari Gunung Merapi.

**Tabel 4.20. Deskripsi Letak dan Karakteristik Geografis Kabupaten Klaten**

Karakteristik	Uraian/Keterangan
<b>01. Letak</b>	- antara 110° 30' s/d 110° 45' Bujur Timur, dan antara 7° 30' s/d 7° 45' Lintang Selatan
<b>02. Batas</b>	: Kabupaten Gunung Kidul (DIY) - Sebelah Selatan : Kabupaten Sleman (DIY). - Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali. - Sebelah Utara <b>- Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo.</b>
<b>03. Ketinggian</b>	- 3,72% terletak pada ketinggian 0-100 m di atas permukaan laut. - 77,52% terletak pada ketinggian 100,-500 m di atas permukaan laut. - 21,76% terletak pada ketinggian 500-1.000 m di atas permukaan laut



<b>04. Iklim</b>	- Kabupaten Klaten mempunyai hari hujan dalam satu tahun dengan rata di bawah 125 hari dengan curah hujan rata-rata di bawah 2.635 mm per tahun.
------------------	--

Sumber: Bappeda-BPS Kabupaten Klaten(2003). **Klaten Dalam Angka 2003.**

#### b. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di wilayah Kabupaten Klaten berdasarkan hasil registrasi pada akhir tahun 2003 tercatat sebesar 1.227.297 jiwa. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 655.56 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk sebesar 1872 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk di Kabupaten Klaten tersebar dalam 26 (dua puluh) Kecamatan dan terbagi menjadi 391 Desa dan 10 Kelurahan. Sebagian besar penduduk bekerja pada Sektor Pertanian dan Industri. Sedangkan yang paling kecil penduduk Kabupaten Klaten bekerja pada Sektor Pertambangan dan galian dan Listrik, gas dan air minum

**Tabel 4.21. Luas Daerah, Pembagian wilayah administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2003**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kelurahan/ Desa	Kepadatan Penduduk (Jiwa per km <sup>2</sup> )
1.	Prambanan	24,43	44927	16	1789
2.	Gantiwarno	25,64	40217	16	1549
3.	Wedi	24,38	54752	19	2189
4.	Bayat	39,43	63675	18	1596
5.	Cawas	34,47	64740	20	2189
6.	Trucuk	33,81	78685	18	1596
7.	Kalikotes	12,98	36342	7	1849
8.	Kebonarum	9,67	21197	7	2282
9.	Jogonalan	26,70	57118	18	2726
10.	Manisrenggo	26,96	40996	16	2168
11.	Karangnongko	26,74	37903	14	2109
12.	Ngawen	16,97	43633	13	1488
13.	Ceper	24,45	63201	18	1399
14.	Pedan	19,17	47872	14	2531
15.	Karandowo	29,23	51585	19	2549



16.	Juwiring	29,79	61477	19	2468
17.	Wonosari	31,14	61533	18	1753
18.	Delanggu	18,78	44333	16	2040
19.	Polanharjo	23,84	45258	18	1951
20.	Karanganom	24,06	49088	19	2357
21.	Tulung	32,00	54470	18	1886
22.	Jatinom	35,53	56618	18	2031
23.	Kemalang	51,66	34604	13	1684
24.	Klaten Selatan	14,43	39845	12	1559
25.	Klaten Tengah	8,92	43177	9	4753
26.	Klaten Utara	10,38	40072	8	3732
	<b>Jumlah</b>	<b>655.56</b>	<b>1.227.2977</b>	<b>206</b>	<b>1872</b>

Sumber: Bappeda-BPS Kabupaten Klaten (2003). **Klaten Dalam Angka 2003.**

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian di Kabupaten Klaten menunjukkan pertumbuhan yang positif. Salah satu indikator yang mengisyaratkan hal itu adalah laju pertumbuhan ekonomi yang positif selama 4 (empat) tahun berturut-turut (tahun 2000, 2001, 2002, 2003). Dari hasil perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Kabupaten Klaten tahun 2003 sebesar Rp 1.343.057,24 juta, yang berarti mengalami kenaikan sekitar 11,96% dari tahun 2000 yang sebesar Rp 1.199.551,88 juta.

Pertumbuhan sektor ekonomi tertinggi dialami oleh Sektor Industri yang dapat menyumbangkan kontribusi terbesar pada sektor ekonomi Kabupaten Klaten sebesar Rp.314.029,51 juta sedangkan sektor yang kontribusinya terkecil adalah Sektor Pertambangan dan Galian Rp. 8.355,88 juta.

#### **d. PDRB Per Kapita**

PDRB Perkapita sebagai salah satu indikator kemakmuran rakyat Kabupaten Klaten yang berpenduduk 1.227.2977 jiwa pada tahun 2003 mencapai Rp. 1.053.576,55 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.017789,50 Pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2003 adalah sebesar 3.5%.

Sedangkan untuk PDRB perkapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2003 adalah sebesar Rp 3.365.344,83 atau rata-rata perbulan sebesar Rp 280.445,40 lebih tinggi dari tahun 2002 yaitu Rp 3.068.266.67 atau rata-rata perbulan sebesar Rp 255.688.88.

#### **e. PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan**

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Klaten pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 16,10%. Tahun 2000 sampai 2003 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,29% pada tahun 2000, dan pada tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi sebesar 10,23%.

Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan Tahun Dasar 1993 perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif pada Tahun 1999 PDRB Kabupaten Klaten mengalami pertumbuhan ekonomi yang terkecil yaitu 0,49%. Pada tahun 2000 terjadi peningkatan yaitu sebesar 3,98%. Tahun 2001 mengalami pertumbuhan meningkat sebesar 4,02% sampai tahun 2003 yang pertumbuhannya terbesar yaitu sebesar 4,03%

Tabel 4.22. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 1993 Kabupaten Klaten Tahun 1999-2003 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
1999	2698234.73	12,35	1153627.74	0,49
2000	2948815.66	9,29	1199551.88	3,98
2001	3352245.32	13,68	1247746.75	4,02
2002	3891798.65	16,10	1290967.26	3,46
2003	4290006.98	10,23	1343057.24	4,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Klaten, 1994-2003. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klaten 1999-2003.**

## B. Hasil Analisis

### 2. Indeks Pembangunan Daerah Setiap kecamatan di Kabupaten/Kota di Wilayah Subosuka Wonosraten tahun 2001-2003.

Setelah Penentuan Bobot Kriteria dan subkriteria, maka proses selanjutnya adalah mencari indikator-indikator yang merupakan operasionalisasi dari subkriteria datanya ada di lapangan; yang dalam hal ini adalah data di 7 (tujuh) Kabupaten/kota, yaitu tahun 2001, 2002, dan tahun 2003.

Dengan adanya indikator-indikator yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, akan dapat dipaparkan secara lebih terperinci mengenai makna dan peran dari masing-masing kriteria dan subkriteria yang ada. Indikator-indikator tersebut merupakan suatu informasi yang rinci berupa data yang dapat digunakan untuk menjelaskan subkriteria.

Kriteria yang dipakai dalam studi ini seperti banyak dijelaskan di bagian sebelumnya, mengacu pada studi Bappenas tahun 2001 dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria/indikator global atau besar, yaitu: (1) Kriteria Kapasitas

Pemerintahan; (2) Kriteria Perkembangan Wilayah; dan (3) Kriteria Keberdayaan Masyarakat. Untuk masing-masing kriteria dijabarkan lagi menjadi 3 (tiga) subkriteria, sehingga jumlah keseluruhan indikator ada 27 (dua puluh tujuh) indikator. Keduapuluhtujuh subkriteria ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan data; yaitu mudah tersedia serta dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan pembangunan daerah menurut *antarwaktu* maupun *antarwilayah/daerah/kecamatan* secara konsisten.

Setelah indikator diperoleh dan dilakukan penentuan intensitas /bobotnya, maka perhitungan *rating* atau ranking IPD (Indeks Pembangunan Daerah) di setiap Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten dapat dilakukan. Intensitas dibuat berdasarkan skala 1 (satu) hingga 9 (sembilan). Dengan penetapan skala IPD yang demikian, maka nilai IPD nantinya akan berkisar antara nilai 1 hingga 9; dimana nilai 1 (satu) menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan yang paling rendah, sedangkan nilai 9 (sembilan) menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan yang paling tinggi. Dengan metode perhitungan tersebut, maka diperoleh nilai IPD untuk keseluruhan kecamatan (124 kecamatan) di setiap Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten pada 3 (tiga) periode yang berbeda, yaitu tahun 2001, 2002, dan tahun 2003. Untuk penentuan kategori Indeks menggunakan penghitungan, yaitu T menunjukkan kategori Indeks Tinggi, diperoleh dari nilai di atas *mean* ditambah  $\frac{1}{2}$  dikali *standar deviasi*. S menunjukkan kategori Indeks Sedang, diperoleh dari nilai yang terletak antara nilai *mean* dikurangi  $\frac{1}{2}$  dikali *standar deviasi* sampai nilai *mean* ditambah  $\frac{1}{2}$  dikali *standar deviasi*. R menunjukkan kategori Indeks Rendah, diperoleh dari nilai di bawah *mean* ditambah  $\frac{1}{2}$  dikali *standar deviasi*.

### a. Kota Surakarta

Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Daerah di setiap kecamatan di Kota Surakarta pada tahun 2001, 2002 dan 2003, menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.23.

Tabel 4.23. IPD Total menurut Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar.

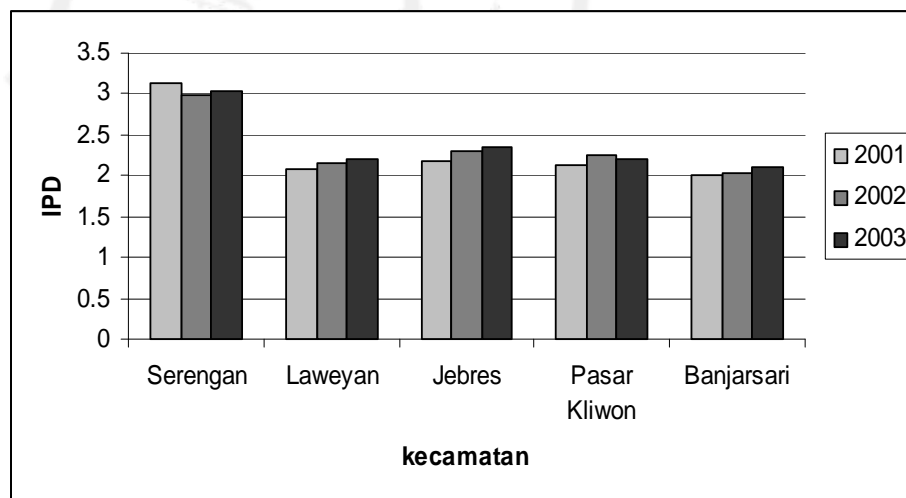
No.	IPD Tahun 2001			IPD Tahun 2002			IPD Tahun 2003		
	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket
1	Serengan	3.1439	T	Serengan	2.9809	T	Serengan	3.0268	T
2	Jebres	2.1790	T	Pasar Kliwon	2.3072	T	Laweyan	2.3391	T
3	Pasar Kliwon	2.1391	T	Jebres	2.2573	T	Jebres	2.2121	T
4	Laweyan	2.0846	T	Laweyan	2.1546	T	Pasar Kliwon	2.1930	T
5	Banjarsari	2.0190	S	Banjarsari	2.0280	S	Banjarsari	2.1067	S
	<i>Mean</i>	<b>2.3131</b>		<i>Mean</i>	<b>2.3456</b>		<i>Mean</i>	<b>2.3755</b>	
	<i>Std. Deviasi</i>	<b>0.4683</b>		<i>Std. Deviasi</i>	<b>0.3709</b>		<i>Std. Deviasi</i>	<b>0.3734</b>	
	<i>Koef variasi</i>	<b>48.92</b>		<i>Rendah</i>	<b>47.33</b>		<i>Rendah</i>	<b>47.30</b>	
	<i>Rendah</i>	<b>1.7039</b>		<i>Tinggi</i>	<b>1.7706</b>		<i>Tinggi</i>	<b>1.7941</b>	
	<i>Tinggi</i>	<b>2.1513</b>			<b>2.1387</b>			<b>2.1651</b>	
	<i>F Hitung</i>	0.029							
	<i>Probabilitas</i>	0971							

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder.

Berdasarkan tabel 4.23. dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) periode analisis yaitu tahun 2001, 2002, dan 2003 Kecamatan Serengan memiliki IPD tertinggi sebesar 3,1439 pada tahun 2001, sebesar 2,9809 pada tahun 2002 dan tahun 2003 memiliki nilai IPD sebesar 3,0268.. Kecamatan yang memiliki urutan kedua setelah Kecamatan Serengan, yaitu Kecamatan Jebres pada tahun 2001 dengan nilai IPD sebesar 2.1790, kemudian digantikan oleh Kecamatan Pasar Kliwon pada tahun 2002 dengan nilai IPD sebesar 2.3072

dan pada tahun 2003 urutan kedua adalah Kecamatan Laweyan. Kecamatan Banjarsari dalam periode 2001, 2002, dan 2003 menempati urutan terbawah dengan nilai IPD pada tahun 2001 sebesar 2,0190, sedangkan pada tahun 2002 dengan nilai IPD sebesar 2,0280 dan pada tahun 2003 nilai IPD sebesar 2,1067.

Perbandingan IPD tahun 2001, 2002 dan 2003 diketahui Kecamatan yang mengalami kenaikan nilai IPD yaitu Laweyan, Jebres, Pasar Kliwon dan Banjarsari, sedangkan Nilai IPD yang mengalami penurunan yaitu Kecamatan Serengan, meskipun selama 3 (tiga) periode berturut-turut memiliki nilai IPD yang paling tinggi. Perbandingan nilai IPD dapat dilihat pada gambar 4.1.



**Gambar 2.1. Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kota Surakarta tahun 2001, 2002 dan 2003.**

*Sumber : Hasil pengolahan data sekunder.*

Rata-rata (*mean*) Indeks Pembangunan Daerah Total selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah sebesar 2,3131 pada tahun 2001; sebesar 2,3456 pada tahun 2002 dan sebesar 2,3755 pada tahun 2003. Standar deviasi Indeks

Pembangunan Daerah Total-nya berturut-turut adalah sebesar 0,4683 pada tahun 2001; sebesar 0.3709 pada tahun 2001 dan sebesar 0.3734 pada tahun 2003, sedangkan nilai koefisien variasi IPD selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut yaitu, paling besar pada tahun 2001 48,92% kemudian 47,33% pada tahun 2002 dan 47% pada tahun 2003.

Penentuan kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kota Surakarta pada tahun 2001, 2002, dan 2003 menunjukkan bahwa ada 4 (empat) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Serengan, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon. Kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 1 (satu) kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarsari.

Untuk pengujian apakah ada perbedaan nilai IPD selama periode tahun 2001, 2002 dan 2003, Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 0,029 dan probabilitasnya sebesar 0,971, maka  $H_0$  diterima, Berarti ketiga rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kota Surakarta selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut identik ataupun tidak mengalami perbedaan yang berarti.

### **b. Kabupaten Boyolali**

Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Daerah di setiap kecamatan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2001, 2002 dan 2003, menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.24.

*Tabel 4.24. IPD Total menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar.*

No.	IPD Tahun 2001			IPD Tahun 2002			IPD Tahun 2003		
	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket
<b>1</b>	Boyolali	6.8358	T	Boyolali	7.2497	T	Boyolali	7.4851	T



2	Selo	2.0189	S	Selo	2.6565	T	Teras	1.8864	S
3	Cepogo	1.8359	S	Cepogo	2.1477	S	Banyudono	1.8731	S
4	Mojosongo	1.8163	S	Mojosongo	1.8236	S	Cepogo	1.8721	S
5	Kemus	1.5794	S	Kemus	1.6651	S	Ampel	1.8551	S
6	Ampel	1.5486	S	Ampel	1.6515	S	Mojosongo	1.8417	S
7	Teras	1.5154	S	Teras	1.6059	S	Juwangi	1.8081	S
8	Juwangi	1.3822	S	Juwangi	1.5464	S	Selo	1.7107	S
9	Musuk	1.3304	S	Musuk	1.5144	S	Sambi	1.6415	S
10	Nogosari	1.2848	S	Nogosari	1.5042	S	Kemus	1.6266	S
11	Ngemplak	1.2196	S	Ngemplak	1.4797	S	Musuk	1.5228	S
12	Klego	1.1141	S	Klego	1.4476	S	Wonosegoro	1.5025	S
13	Wonosegoro	1.1123	S	Wonosegoro	1.4327	S	Nogosari	1.3955	S
14	Andong	1.0731	S	Andong	1.3482	S	Karanggede	1.3779	S
15	Simo	1.0728	S	Simo	1.2719	S	Simo	1.3754	S
16	Sambi	1.0715	S	Sambi	1.2586	S	Klego	1.2953	S
17	Karanggede	1.0405	S	Karanggede	1.1593	R	Ngemplak	1.2370	S
18	Banyudono	1.0028	S	Banyudono	1.1463	R	Andong	1.2042	S
19	Sawit	0.9415	R	Sawit	1.1429	R	Sawit	1.1867	R
	<b>Mean</b>	<b>1.6208</b>		<b>Mean</b>	<b>1.8449</b>		<b>Mean</b>	<b>1.8788</b>	
	<b>Std Deviasi</b>	<b>1.3011</b>		<b>Std Deviasi</b>	<b>1.3588</b>		<b>Std Deviasi</b>	<b>1.3799</b>	
	<b>Koef Var</b>	<b>80.27</b>		<b>Koef Var</b>	<b>73.65</b>		<b>Koef Var</b>	<b>73.45</b>	
	<b>Rendah</b>	<b>0.9703</b>		<b>Rendah</b>	<b>1.1654</b>		<b>Rendah</b>	<b>1.1888</b>	
	<b>Tinggi</b>	<b>2.2714</b>		<b>Tinggi</b>	<b>2.3243</b>		<b>Tinggi</b>	<b>2.5688</b>	
	<b>F hitung</b>				<b>0.207</b>				
	<b>Probabilitas</b>				<b>0.814</b>				

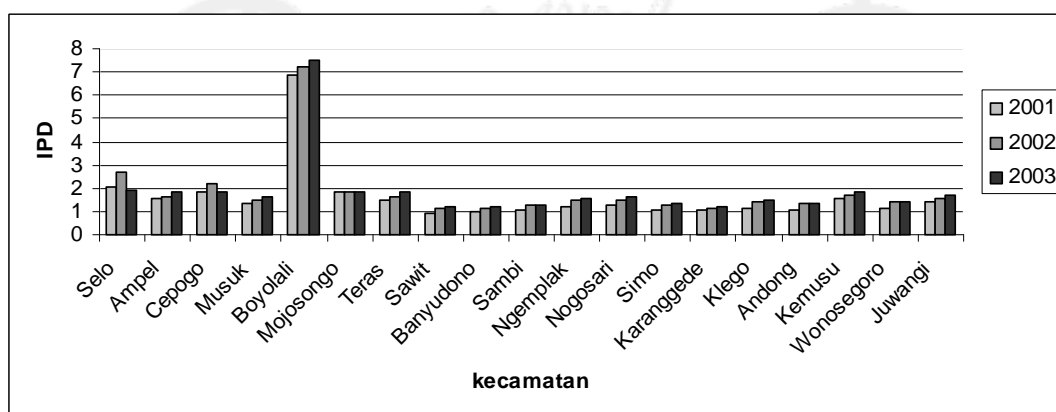
Berdasarkan tabel 4.24 dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) periode

analisis, pada tahun 2001 Kecamatan Boyolali memiliki IPD tertinggi sebesar 6,8368 selanjutnya pada tahun 2002 sebesar 7,2497 dan pada tahun 2003 IPD Kecamatan Boyolali masih terbesar yaitu 7,4851. Pada urutan kedua setelah kecamatan Boyolali, yaitu Kecamatan Selo pada tahun 2001 dan 2002 dengan masing-masing nilai IPD 2,0189 dan 2,6565. Pada tahun 2003 urutan kedua ditempati Kecamatan Teras dengan Nilai IPD 1,8864, sedangkan Kecamatan Selo turun di urutan 8. Nilai IPD terendah secara berturut-turut dari tahun 2001 dan 2002 yaitu Kecamatan Sawit sebesar 0,9415 dan 1.1429 sedangkan pada tahun 2003 nilai IPD terendah masih ditempati Kecamatan sawit sebesar 1,1867.

Perbandingan nilai IPD tahun 2002 dan tahun 2003 yaitu yang mengalami peningkatan meliputi semua Kecamatan kecuali 2 (dua) yang



mengalami penurunan yaitu. 2003 ke tahun 2002 yaitu Kecamatan Wonosegoro dan Selo. Perbandingan IPD tahun 2001 dan 2002 diketahui Kecamatan yang mengalami kenaikan nilai IPD yaitu semua kecamatan di kabupaten Boyolali. Perbandingan nilai IPD dapat dilihat pada gambar 4.2.



**Gambar 2.2. Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kabupaten Boyolali tahun 2001, 2002 dan 2003.**

*Sumber : Hasil pengolahan data sekunder.*

Rata-rata (*mean*) Indeks Pembangunan Daerah Total selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah sebesar 1,6208 pada tahun 2001; sebesar 1,8449 pada tahun 2002 dan sebesar 1,8878 pada tahun 2003. Standar deviasi Indeks Pembangunan Daerah Total-nya berturut-turut adalah sebesar 1,3011 pada tahun 2001; sebesar 1,3588 pada tahun 2002 dan sebesar 1,3799 pada tahun 2003. sedangkan nilai koefisien variasi IPD selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu, paling besar pada tahun 2001 80,27% kemudian 73,65% pada tahun 2002 dan 73,45% pada tahun 2003.

Penentuan kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2001 menunjukkan bahwa ada 1 (satu) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Boyolali, Kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 15 (lima belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Juwangi, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Selo, Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Ampel, Kecamatan Musuk, Kecamatan Teras, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Banyudono, , Kecamatan Simo, Kecamatan Klego, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Andong, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Sambu, dan Kecamatan Mojosongo. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 1 (satu) kecamatan, yaitu Kecamatan Sawit.

Kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2002 menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Ampel.. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Karanggede, Kecamatan Banyudono, dan Kecamatan Sawit.

Kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Boyolali. Kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 15 (lima belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Ampel, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Musuk, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Teras, Kecamatan Simo., yaitu Kecamatan Nogosari, Kecamatan

Juwangi, Kecamatan Sawit, Kecamatan Klego, Kecamatan Karanggede, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Sambu, Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 1 (satu) kecamatan, yaitu kecamatan Sawit

Untuk pengujian apakah ada perbedaan nilai IPD selama periode tahun 2001, 2002 dan 2003, Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 0,207 dan probabilitasnya sebesar 0,814, maka  $H_0$  diterima. Berarti ketiga rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kabupaten Boyolali selama 3 (tiga) tahun berturut-turut identik ataupun tidak mengalami perbedaan yang berarti.

### **c. Kabupaten Sukoharjo**

Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Daerah di setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2001, 2002 dan 2003, menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.25.

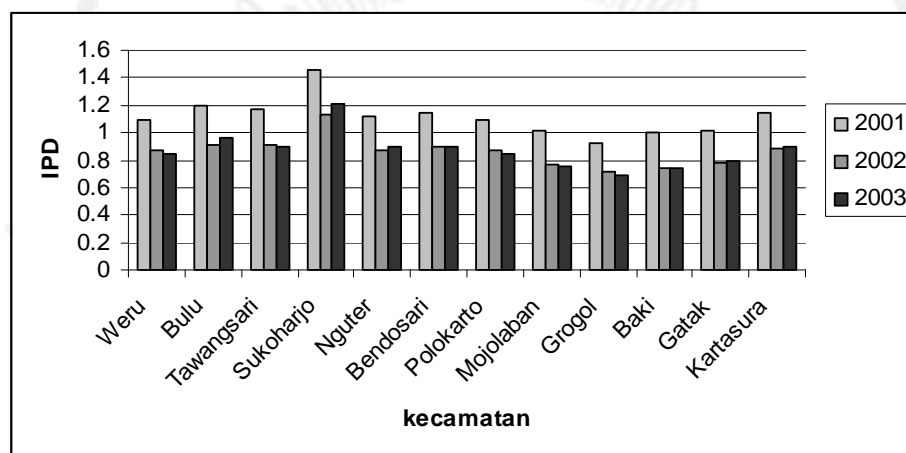
Tabel 4.25. IPD Total menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar.

No.	IPD Tahun 2001			IPD Tahun 2002			IPD Tahun 2003		
	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket
1	Sukoharjo	1.4536	T	Sukoharjo	1.1360	T	Sukoharjo	1.2045	T
2	Bulu	1.2009	T	Bendosari	0.9083	S	Kartasura	0.9635	T
3	Tawang Sari	1.1688	S	Polokarto	0.9043	S	Bendosari	0.8978	S
4	Bendosari	1.1436	S	Tawang Sari	0.8995	S	Tawang Sari	0.8961	S
5	Kartasura	1.1432	S	Nguter	0.8903	S	Bulu	0.8954	S
6	Nguter	1.1201	S	Bulu	0.8738	S	Polokarto	0.8947	S
7	Polokarto	1.0948	S	Weru	0.8699	S	Weru	0.8431	S
8	Weru	1.0924	S	Kartasura	0.8665	S	Nguter	0.8426	S
9	Gatak	1.0194	R	Grogol	0.7841	R	Mojolaban	0.7900	R
10	Mojolaban	1.0091	R	Mojolaban	0.7664	R	Grogol	0.7590	R
11	Baki	1.0064	R	Gatak	0.7431	R	Baki	0.7439	R
12	Grogol	0.9277	R	Baki	0.7189	R	Gatak	0.6890	R
	<b>Mean</b>	<b>1.1150</b>		<b>Mean</b>	<b>0.8634</b>		<b>Mean</b>	<b>0.8683</b>	
	<b>Std Deviasi</b>	<b>0.1330</b>		<b>Std Deviasi</b>	<b>0.1092</b>		<b>Std Deviasi</b>	<b>0.1322</b>	
	<b>Koef Var</b>	<b>11.93</b>		<b>Koef Var</b>	<b>12.65</b>		<b>Koef Var</b>	<b>15.22</b>	
	<b>Rendah</b>	<b>1.0485</b>		<b>Rendah</b>	<b>0.8088</b>		<b>Rendah</b>	<b>0.8022</b>	
	<b>Tinggi</b>	<b>1.1815</b>		<b>Tinggi</b>	<b>0.9180</b>		<b>Tinggi</b>	<b>0.9344</b>	
	<b>F hitung</b>	<b>15,819</b>							
	<b>Probabilitas</b>	<b>0.000</b>							

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder.

Berdasarkan tabel 4.25. dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) periode analisis, pada tahun 2001 Kecamatan Sukoharjo memiliki IPD tertinggi sebesar 1,4536 selanjutnya pada tahun 2002 sebesar 1,1360 dan pada tahun 2003 IPD Kecamatan Sukoharjo masih terbesar yaitu 1,2045. Pada urutan kedua setelah Kecamatan Sukoharjo, yaitu Kecamatan Bulu pada tahun 2001 dengan nilai IPD 1,2009, sedangkan pada tahun 2002 Kecamatan Bendosari menempati urutan kedua dengan nilai IPD 0,9083. Pada tahun 2003 urutan kedua ditempati Kecamatan Kartasura dengan Nilai IPD 0,9635. Nilai IPD terendah secara berturut-turut dari tahun 2001 yaitu Kecamatan Grogol sebesar 0,9415, sedangkan tahun 2002, yaitu Kecamatan Baki dengan nilai IPD 0,7189. Pada tahun 2003 nilai IPD terendah ditempati Kecamatan Gatak sebesar 0,6890.

Perbandingan nilai IPD tahun 2001 dan tahun 2002 yang mengalami penurunan yang meliputi semua Kecamatan. Perbandingan IPD tahun 2002 dan 2003 diketahui Kecamatan yang mengalami kenaikan nilai IPD terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bulu, Kecamatan Mojolaban, dan Kecamatan Baki. Kecamatan yang mengalami penurunan nilai IPD terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Kartasura, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Weru, Kecamatan Nguter, Kecamatan Gatak, dan Kecamatan Grogol. Perbandingan nilai IPD dapat dilihat pada gambar 4.3.



**Gambar 2.3. Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo tahun 2001, 2002 dan 2003.**

Rata-rata (*mean*) Indeks Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun berturut-turut adalah sebesar 1,1150 pada tahun 2001; sebesar 0,8634 pada tahun 2002 dan sebesar 0,8683 pada tahun 2003. Standar deviasi Indeks Pembangunan Daerah Total-nya berturut-turut adalah sebesar 0,1330 pada tahun 2001; sebesar 0,1092 pada tahun 2002 dan sebesar 0,1322 pada tahun 2003. sedangkan nilai koefisien variasi IPD selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut yaitu, pada tahun 2001 11,93% kemudian 12,65% pada tahun 2002 dan

15,22% pada tahun 2003. Nilai koefisien variasi pada tahun 2003 adalah yang terbesar.

Penentuan kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2001 menunjukkan bahwa ada 2 (dua) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Bulu. Kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Nguter, dan Kecamatan Weru. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban.

Kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2002 menunjukkan bahwa terdapat 1(satu) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Sukoharjo. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 7 (tujuh) kecamatan, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Nguter, dan Kecamatan Weru. Kategori kecamatan dengan IPD yang rendah yaitu sebanyak 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban.

Kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat 2(dua) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan

Boyolali dan Kecamatan Kartasura. Kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Nguter, dan Kecamatan Weru. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban.

Untuk pengujian apakah ada perbedaan nilai IPD selama periode tahun 2001, 2002 dan 2003, Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 15,819 dan probabilitasnya sebesar 0,000, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti ketiga rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak identik ataupun mengalami perbedaan yang berarti.

#### d. Kabupaten Karanganyar

Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Daerah di setiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2001, 2002 dan 2003, menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.26.

Tabel 4.26. IPD Total menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar.

No.	IPD Tahun 2001			IPD Tahun 2002			IPD Tahun 2003		
	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket
1	Jaten	6.7842	T	Karanganyar	2.5930	T	Jaten	7.7050	T
2	Karanganyar	6.0190	T	Colomadu	2.5913	T	Karanganyar	6.3871	T
3	Colomadu	4.5124	T	Jatioso	2.1556	T	Colomadu	4.7957	T
4	Kebakkramat	3.8564	T	Ngargoyoso	2.1524	T	Kebakkramat	4.5308	T
5	Tawangmangu	3.5468	S	Jaten	2.0927	T	Gondangrejo	3.5751	S
6	Jenawi	3.1786	S	Tawangmangu	1.9063	S	Ngargoyoso	3.5345	S
7	Ngargoyoso	3.1626	S	Jenawi	1.8918	S	Jenawi	3.5263	S
8	Gondangrejo	3.1349	S	Kebakkramat	1.7575	S	Jatioso	3.3247	S
9	Jatioso	2.9889	S	Jumantono	1.7492	S	Karangpandan	3.2253	S
10	Matesih	2.7315	S	Gondangrejo	1.6823	S	Matesih	3.1209	S
11	Jumantono	2.7065	S	Karangpandan	1.6475	S	Jumantono	3.0836	S
12	Karangpandan	2.6909	R	Matesih	1.6462	S	Mojogedang	2.8903	R



<b>13</b>	Tasikmadu	2.6255	R	Tasikmadu	1.6177	R	Jatipuro	2.8377	R	
<b>14</b>	Mojogedang	2.5337	R	Kerjo	1.5129	R	Tasikmadu	2.7692	R	
<b>15</b>	Jatipuro	2.3973	R	Jatipuro	1.4659	R	Jumapolo	2.6920	R	
<b>16</b>	Jumapolo	2.1416	R	Mojogedang	1.3517	R	Tawangmangu	2.6687	R	
<b>17</b>	Kerjo	1.9549	R	Jumapolo	1.2795	R	Kerjo	2.2635	R	
	<b>Mean</b>	<b>3.3509</b>		<b>Mean</b>	<b>1.8290</b>		<b>Mean</b>	<b>3.7018</b>		
	<b>Std Deviasi</b>	<b>1.3120</b>		<b>Std Deviasi</b>	<b>0.3841</b>		<b>Std Deviasi</b>	<b>1.4299</b>		
	<b>Koef Var</b>	<b>39.15</b>		<b>Koef Var</b>	<b>21.00</b>		<b>Koef Var</b>	<b>38.63</b>		
	<b>Rendah</b>	<b>2.6949</b>		<b>Rendah</b>	<b>1.6369</b>		<b>Rendah</b>	<b>2.9868</b>		
	<b>Tinggi</b>	<b>4.0069</b>		<b>Tinggi</b>	<b>2.0211</b>		<b>Tinggi</b>	<b>4.4167</b>		
	<b>F Hitung</b>								<b>6,956</b>	
	<b>Probabilitas</b>								<b>0,002</b>	

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder.

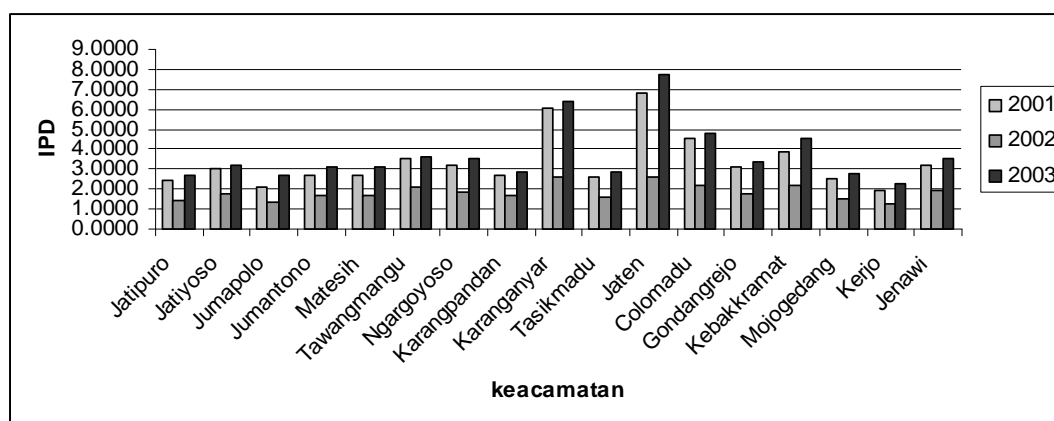
Berdasarkan tabel 4.25. dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) periode analisis, pada tahun 2001 dan 2003 Kecamatan Jaten memiliki IPD tertinggi sebesar 6,7842 dan 7,7050 selanjutnya pada tahun 2002, nilai IPD terbesar adalah Kecamatan Karanganyar sebesar 2,5930. Pada urutan kedua, yaitu Kecamatan Karanganyar pada tahun 2001 dengan nilai IPD 6,0190, sedangkan pada tahun 2002 Kecamatan Colomadu menempati urutan kedua dengan nilai IPD 2,5913 . Pada tahun 2003 urutan kedua ditempati Kecamatan Karanganyar dengan Nilai IPD 6,3871. Nilai IPD terendah secara berturut-turut dari tahun 2001 yaitu Kecamatan Kerjo sebesar 1,9549 sedangkan tahun 2002, yaitu Kecamatan Jumapolo dengan nilai IPD 1,2795. Pada tahun 2003 nilai IPD terendah ditempati Kecamatan Kerjo sebesar 2,2635. Nilai IPD terbesar di Kabupaten Karanganyar justru tidak ditempati oleh Kecamatan Kota (Karanganyar), tetapi oleh Kecamatan Jaten. Hal ini dikarenakan Indeks Keberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jaten lebih besar dibanding Kecamatan Karanganyar.

Perbandingan nilai IPD tahun 2001 dan tahun 2002 mengalami penurunan yang meliputi semua Kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Perbandingan IPD tahun 2002 dan 2003 diketahui setiap kecamatan



mengalami kenaikan nilai IPD yang cukup besar setelah pada tahun 2002 nilai IPD-nya menurun. Perbandingan nilai IPD dapat dilihat pada gambar

4.4.



**Gambar 4.4. Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar tahun 2001, 2002 dan 2003.**

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder.

Rata-rata (*mean*) Indeks Pembangunan Daerah Total selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah sebesar 3,3509 pada tahun 2001; sebesar 1,2890 pada tahun 2002 dan sebesar 3,7018 pada tahun 2003. Standar deviasi Indeks Pembangunan Daerah Total-nya berturut-turut adalah sebesar 1,3120 pada tahun 2001; sebesar 0,3841 pada tahun 2002 dan sebesar 1,4299 pada tahun 2003. sedangkan nilai koefisien variasi IPD selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu, pada tahun 2001 39,15% kemudian 21,00% pada tahun 2002 dan 38,63% pada tahun 2003. Nilai koefisien variasi pada tahun 2001 adalah yang terbesar.

Penentuan kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2001 menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu

Kecamatan Jaten, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Colomadu. Kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Nargoyoso, Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Matesih dan Kecamatan Jumantono. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jumapolo dan Kecamatan Kerjo.

Kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2002 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Nargoyoso dan Kecamatan Jaten. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 7 (tujuh) kecamatan, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Matesih, Kecamatan Gondangrejo, kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Jumantono. Kategori kecamatan dengan IPD yang rendah yaitu sebanyak 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Mojogedang dan Kecamatan Jumapolo.

Kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat 4(empat) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Colomadu, Kecamatan

Kebakkramat dan Kecamatan Jaten. Kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 6(enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan Jumantono. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 6(enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Kerjo.

Untuk pengujian apakah ada perbedaan nilai IPD selama periode tahun 2001, 2002 dan 2003, Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 15,819 dan probabilitasnya sebesar 0,002, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti ketiga rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak identik ataupun mengalami perbedaan yang berarti.

#### e. Wonogiri

Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Daerah di setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2001, 2002 dan 2003, menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.27.

Tabel 4.27. IPD Total menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar.

	IPD Tahun 2001	IPD Tahun 2002	IPD Tahun 2003
--	----------------	----------------	----------------

No.	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket
1	Wonogiri	4.7127	T	Wonogiri	4.2699	T	Wonogiri	5.0596	T
2	Paranggupito	3.2874	T	Puhpelem	3.0012	T	Karangtengah	4.3571	T
3	Karangtengah	3.2187	T	Paranggupito	2.7845	T	Wuryantoro	4.2627	T
4	Baturetno	3.1353	T	Baturetno	2.7679	T	Paranggupito	4.1444	T
5	Batuwarno	2.8333	T	Jatisrono	2.3828	S	Baturetno	4.0111	T
6	Jatisrono	2.2577	T	Karangtengah	2.3104	S	Batuwarno	3.7283	T
7	Giritontro	2.2437	T	Slogohimo	2.2037	S	Eromoko	3.4400	T
8	Selogiri	2.2059	S	Kismantoro	2.1366	S	Giritontro	3.0615	S
9	Sidoharjo	2.1658	S	Purwantoro	2.1214	S	Jatisrono	2.9446	S
10	Nguntoronadi	2.0559	S	Sidoharjo	2.0396	S	Sidoharjo	2.8061	S
11	Kismantoro	1.9785	S	Ngadirojo	1.9322	S	Selogiri	2.7579	S
12	Katipurno	1.9544	S	Nguntoronadi	1.9314	S	Nguntoronadi	2.6003	S
13	Wuryantoro	1.9455	S	Wuryantoro	1.9119	S	Katipurno	2.5941	S
14	Jatiroto	1.8622	S	Jatiroto	1.9115	S	Bulukerto	2.5717	S
15	Giriwoyo	1.8552	S	Batuwarno	1.9038	S	Kismantoro	2.5312	S
16	Manyaran	1.8408	S	Giriwoyo	1.9018	S	Purwantoro	2.4744	R
17	Ngadirojo	1.8039	S	Katipurno	1.8844	S	Puhpelem	2.4131	R
18	Girimarto	1.7909	S	Bulukerto	1.8731	S	Giriwoyo	2.3338	R
19	Slogohimo	1.7559	S	Girimarto	1.8724	S	Manyaran	2.3287	R
20	Tirtomoyo	1.7550	S	Giritontro	1.8446	S	Girimarto	2.3098	R
21	Pracimantoro	1.7366	S	Manyaran	1.7629	R	Ngadirojo	2.2866	R
22	Purwantoro	1.7255	S	Eromoko	1.7519	R	Slogohimo	2.2709	R
23	Bulukerto	1.6621	R	Tirtomoyo	1.7425	R	Jatiroto	2.2631	R
24	Eromoko	1.6146	R	Pracimantoro	1.5953	R	Pracimantoro	2.1960	R
25	Puhpelem	0.0000	0	Selogiri	1.0080	R	Tirtomoyo	1.9646	R
	<b>Mean</b>	<b>2.1359</b>		<b>Mean</b>	<b>2.1138</b>		<b>Mean</b>	<b>2.9485</b>	
	<b>Std Deviasi</b>	<b>0.8392</b>		<b>Std Deviasi</b>	<b>0.6056</b>		<b>Std Deviasi</b>	<b>0.8365</b>	
	<b>Koef Var</b>	<b>39.29</b>		<b>Koef Var</b>	<b>28.65</b>		<b>Koef Var</b>	<b>28.37</b>	
	<b>Rendah</b>	<b>1,7163</b>		<b>Rendah</b>	<b>1,8110</b>		<b>Rendah</b>	<b>2,5302</b>	
	<b>Tinggi</b>	<b>2.5555</b>		<b>Tinggi</b>	<b>2.4166</b>		<b>Tinggi</b>	<b>3.3667</b>	
	<b>F Hitung</b>				<b>9,853</b>				
	<b>Probabilitas</b>				<b>0,000</b>				

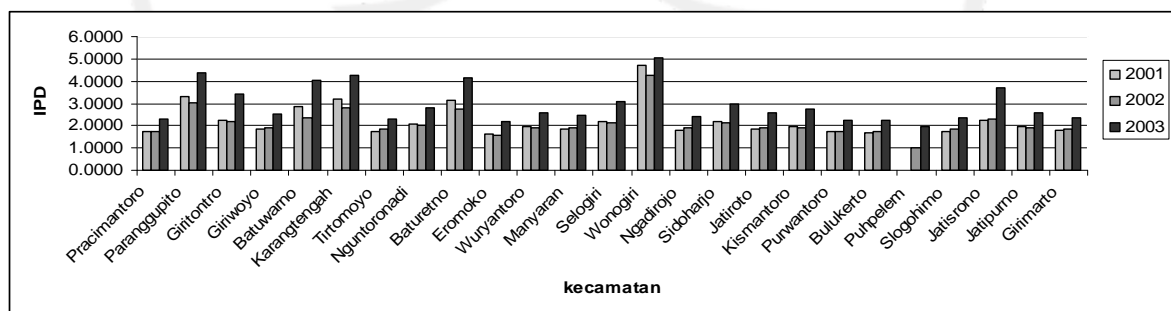
Sumber : Hasil pengolahan data sekunder.

Berdasarkan tabel 4.27. dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) periode analisis, pada tahun 2001, 2002 dan 2003 Kecamatan Wonogiri memiliki IPD tertinggi sebesar 4,7172, 4.2699 dan 5.0596. Pada urutan kedua, yaitu Kecamatan Paranggupito pada tahun 2001 dengan nilai IPD 3.2874, sedangkan pada tahun 2002 Kecamatan Puhpelem menempati urutan kedua dengan nilai IPD 3.0012. Pada tahun 2003 urutan kedua ditempati Kecamatan Karangtengah dengan Nilai IPD 4.3571 Nilai IPD terendah secara berturut-turut dari tahun 2001 yaitu Kecamatan Eromoko sebesar 1.6146 sedangkan tahun 2002, yaitu Kecamatan Selogiri dengan nilai IPD 1,0080. Pada tahun 2003 nilai IPD terendah ditempati Kecamatan Tirtomoyo

sebesar 1.9646. Kecamatan Puhpelem merupakan kecamatan yang baru dibentuk pada tahun 2002 dan langsung menempati urutan dua pada nilai IPD di tahun tersebut. Hal ini dikarenakan faktor besarnya Indeks Kapabilitas pemerintah (IKP) pada tahun 2002, dengan besarnya alokasi dana dari sumber APBD untuk Kecamatan Puhpelem.

Perbandingan nilai IPD tahun 2001 dan tahun 2002 mengalami penurunan yang meliputi sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Perbandingan IPD tahun 2001 dan 2002 diketahui setiap kecamatan mengalami kenaikan nilai IPD yang cukup besar, yaitu Kecamatan Jatisrono, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Bulukerto, Kecamatan Purwanto, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Girimarto dan Kecamatan Slogohimo. Sedangkan perbandingan nilai IPD pada tahun 2002 dan 2003, adalah nilai IPD setiap kecamatan mengalami kenaikan, kecuali Kecamatan Puhpelem yang nilai IPD-nya turun. Perbandingan nilai IPD dapat dilihat pada gambar

4.5.



**Gambar 4.5. Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri tahun 2001, 2002 dan 2003.**

*Sumber : Hasil pengolahan data sekunder.*

Rata-rata (*mean*) Indeks Pembangunan Daerah Total selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah sebesar 2.1359 pada tahun 2001; sebesar 2,1138 pada tahun 2002 dan sebesar 2,9845 pada tahun 2003. Standar deviasi Indeks

Pembangunan Daerah Total-nya berturut-turut adalah sebesar 0,3892 pada tahun 2001; sebesar 0,60256 pada tahun 2002 dan sebesar 0,8365 pada tahun 2003. sedangkan nilai koefisien variasi IPD selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut yaitu, pada tahun 2001 39,29% kemudian 28,65% pada tahun 2002 dan 28,37% pada tahun 2003. Nilai koefisien variasi pada tahun 2001 adalah yang terbesar.

Penentuan kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2001 menunjukkan bahwa ada 7 (tujuh) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Paranggupito, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Baturetno, Kecamatan Batuwarno, Kecamatan Jatisrono dan Kecamatan Giritontro. Sedangkan Kecamatan yang masuk dalam kategori rendah yaitu, Kecamatan Bulukerto dan Kecamatan Eromoko

Kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2002 menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Puhpelem, Kecamatan Paranggupito, dan Kecamatan Batureno. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 5 (lima) kecamatan, Kecamatan Manyaran, Kecamatan Eromoko, Kecamatan Tirtomoyo, Kecamatan Pracimantoro, dan Kecamatan Selogiri.

Kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat 7(tujuh) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Wuryantoro, Kecamatan

Paranggupito, Kecamatan Baturetno, Kecamatan Batuwarno, dan Kecamatan Eromoko. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Puhpelem, Kecamatan Giriwoyo, Kecamatan Manyaran, Kecamatan Girimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Slogohimo, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Pracimantoro, dan Kecamatan Tirtomoyo.

Untuk pengujian apakah ada perbedaan nilai IPD selama periode tahun 2001, 2002 dan 2003, Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 9,863 dan probabilitasnya sebesar 0,000, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti ketiga rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak identik ataupun mengalami perbedaan yang berarti.

#### **f. Kabupaten Sragen**

Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Daerah di setiap kecamatan di Kabupaten Sragen pada tahun 2001, 2002 dan 2003, menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.28.



Tabel 4.28. IPD Total menurut Kecamatan di Kabupaten Sragen Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar.

No.	IPD Tahun 2001			IPD Tahun 2002			IPD Tahun 2003		
	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket
1	Sragen	7.2746	T	Sragen	7.6132	T	Sragen	4.0238	T
2	Jenar	2.1323	T	Karangmalang	2.3892	T	Karangmalang	2.5022	T
3	Ngrampal	1.9812	T	Jenar	2.1637	T	Ngrampal	2.3216	T
4	Tangen	1.8907	T	Tangen	1.9476	T	Jenar	2.2946	T
5	Sambungmacan	1.8848	S	Ngrampal	1.8974	S	Tangen	2.1939	S
6	Gesi	1.8002	S	Sambungmacan	1.8197	S	Gesi	2.0852	S
7	Karangmalang	1.7800	S	Kalijambe	1.8070	S	Sambungmacan	2.0235	S
8	Gondang	1.7278	S	Gesi	1.7682	S	Gondang	2.0151	S
9	Sidoharjo	1.6448	S	Sumberlawang	1.7145	S	Kedawung	2.0086	S
10	Sambirejo	1.5975	S	Tanon	1.6737	S	Tanon	1.8353	S
11	Sukodono	1.5853	S	Sukodono	1.5892	S	Sumberlawang	1.8165	S
12	Sumberlawang	1.5801	S	Kedawung	1.5732	S	Mondokan	1.8050	S
13	Mondokan	1.5795	S	Gondang	1.5544	S	Masaran	1.8017	S
14	Tanon	1.5401	S	Sambirejo	1.5395	S	Sukodono	1.7959	S
15	Kalijambe	1.4630	S	Mondokan	1.5033	S	Sambirejo	1.7630	S
16	Masaran	1.4331	S	Miri	1.4966	S	Miri	1.7176	S
17	Kedawung	1.4298	R	Masaran	1.4050	R	Sidoharjo	1.6534	R
18	Miri	1.2209	R	Plupuh	1.2549	R	Kalijambe	1.4974	R
19	Plupuh	1.2025	R	Sidoharjo	1.0313	R	Gemolong	1.1948	R
20	Gemolong	1.0455	R	Gemolong	1.0109	R	Plupuh	0.9592	R
	<b>Mean</b>	<b>1.8897</b>		<b>Mean</b>	<b>1.9376</b>		<b>Mean</b>	<b>1.9654</b>	
	<b>Std Deviasi</b>	<b>1.2629</b>		<b>Std Deviasi</b>	<b>1.3420</b>		<b>Std Deviasi</b>	<b>0.5908</b>	
	<b>Koef Var</b>	<b>66.83</b>		<b>Koef Var</b>	<b>69.26</b>		<b>Koef Var</b>	<b>30.06</b>	
	<b>Rendah</b>	<b>1.2582</b>		<b>Rendah</b>	<b>1.2666</b>		<b>Rendah</b>	<b>1.6700</b>	
	<b>Tinggi</b>	<b>2.5211</b>		<b>Tinggi</b>	<b>2.6086</b>		<b>Tinggi</b>	<b>2.2608</b>	
	<b>F hitung</b>			<b>0.022</b>					
	<b>Probabilitas</b>			<b>0.978</b>					

Sumber : Hasil pengolahan data sekunder.

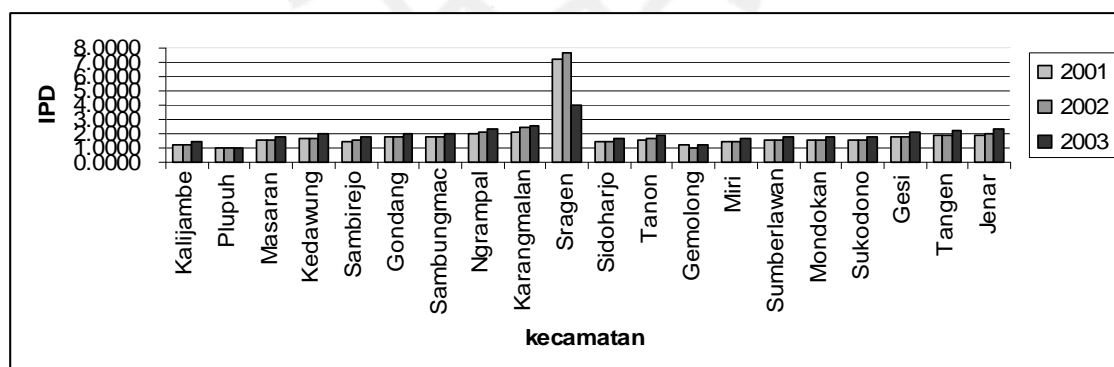
Berdasarkan tabel 4.28. dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) periode analisis, pada tahun 2001, 2002 dan 2003 Kecamatan Sragen memiliki IPD tertinggi sebesar 7,2746, 7,6132 dan 4,0238. Pada urutan kedua, yaitu Kecamatan Jenar pada tahun 2001 dengan nilai IPD 2,1323, sedangkan pada tahun 2002 Kecamatan Karangmalang menempati urutan kedua dengan nilai IPD 2,3892 Pada tahun 2003 urutan kedua ditempati Kecamatan



Karangmalang dengan Nilai IPD 2,5022 Nilai IPD terendah secara berturut-turut dari tahun 2001 yaitu Kecamatan Gemolong sebesar 1,0455 sedangkan tahun 2002, yaitu Kecamatan Gemolong dengan nilai IPD 1,0109. Pada tahun 2003 nilai IPD terendah ditempati Kecamatan Plupuh sebesar 0,9592. Kecamatan Karangmalang merupakan kecamatan yang pada tahun 2001 mempunyai nilai IPD 1,7800 dan menempati rangking 7. Pada tahun 2002 dan 2003 menempati urutan kedua, hal ini dikarenakan kenaikan nilai IPD akibat faktor besarnya Indeks Kapabilitas Pemerintah (IKP).

Perbandingan nilai IPD tahun 2001 dan tahun 2002 mengalami penurunan yang meliputi sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Sragen. Perbandingan IPD tahun 2001 dan 2002 diketahui setiap kecamatan mengalami kenaikan nilai IPD, yaitu Kecamatan Jatisrono, Kecamatan Jenar, Kecamatan Tangen, Kecamatan Plupuh, Kecamatan Miri, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Tanon Kecamatan Sumberlawang dan Kecamatan Sukodono. Sedangkan perbandingan nilai IPD pada tahun 2002 dan 2003, adalah nilai IPD setiap kecamatan mengalami kenaikan, kecuali Kecamatan Plupuh yang nilai IPD-nya turun.

Perbandingan nilai IPD dapat dilihat pada gambar 4.6.



**Gambar 4.6. Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kabupaten Sragen tahun 2001, 2002 dan 2003.**

*Sumber : Hasil pengolahan data sekunder.*

Rata-rata (*mean*) Indeks Pembangunan Daerah Total selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah sebesar 1,8897 pada tahun 2001; sebesar 1,9376 pada tahun 2002 dan sebesar 1,9645 pada tahun 2003. Standar deviasi Indeks Pembangunan Daerah Total-nya berturut-turut adalah sebesar 1,2629 pada tahun 2001; sebesar 1,3420 pada tahun 2002 dan sebesar 0,5908 pada tahun 2003. sedangkan nilai koefisien variasi IPD selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut yaitu, pada tahun 2001 66,83% kemudian 66,26% pada tahun 2002 dan 30,06% pada tahun 2003. Nilai koefisien variasi pada tahun 2001 adalah yang terbesar.

Penentuan kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Sragen pada tahun 2001 menunjukkan bahwa ada 4 (empat) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Sragen, Kecamatan Jenar, Kecamatan Nrapal, dan Kecamatan Tangen. Sedangkan Kecamatan yang masuk dalam kategori rendah yaitu, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Miri, Kecamatan Plupuh dan Kecamatan Gemolong.

Kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Sragen pada tahun 2002 menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Sragen, Kecamatan Jenar, Kecamatan Nrapal, dan Kecamatan Tangen. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 4 (empat) kecamatan, Kecamatan Masaran, Kecamatan Plupuh, Kecamatan Sidoharjo dan Kecamatan Gemolong.

Kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Sragen pada tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat 4

(empat) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Sragen, Kecamatan Jenar, Kecamatan Nrampal, dan Kecamatan Karangmalang. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Gemolong, dan Kecamatan Plupuh.

Untuk pengujian apakah ada perbedaan nilai IPD selama periode tahun 2001, 2002 dan 2003, Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 0,022 dan probabilitasnya sebesar 0,978, maka  $H_0$  diterima. Berarti ketiga rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sragen selama 3 (tiga) tahun berturut-turut identik ataupun tidak mengalami perbedaan yang berarti.

#### **g. Kabupaten Klaten**

Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Daerah di setiap kecamatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2001, 2002 dan 2003, menunjukkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.29.

Tabel 4.29. IPD Total menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2001-2003 diurutkan dari yang terbesar.

No.	IPD Tahun 2001			IPD Tahun 2002			IPD Tahun 2003		
	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket	Kecamatan	Indeks	Ket
1	Klaten Utara	7.8190	T	Klaten Tengah	7.8019	T	Klaten Utara	7.8854	T
2	Klaten Tengah	6.8930	T	Klaten Utara	7.4476	T	Klaten Selatan	7.5257	T
3	Klaten Selatan	5.9879	T	Klaten Selatan	7.2229	T	Klaten Tengah	7.1653	T
4	Delanggu	5.4259	T	Delanggu	6.2612	T	Delanggu	7.1488	T
5	Ceper	4.1335	S	Ceper	4.5035	S	Kemalang	5.6400	T
6	Pedan	3.7669	S	Ngawen	4.2968	S	Ceper	5.4430	T
7	Tulung	3.6492	S	Pedan	4.1292	S	Ngawen	5.1136	S
8	Trucuk	3.5953	S	Jatinom	3.8531	S	Pedan	4.9946	S
9	Kebonarum	3.4114	S	Trucuk	3.8305	S	Karanganom	4.7012	S
10	Ngawen	3.4019	S	Juwiring	3.7211	S	Gantiwarno	4.3002	S
11	Kemalang	3.2189	S	Manisrenggo	3.6948	S	Kebonarum	4.2508	S
12	Kalikotes	3.2132	S	Kemalang	3.6525	S	Juwiring	4.2463	S
13	Jogonalan	3.0786	S	Jogonalan	3.6414	S	Manisrenggo	4.2253	S
14	Bayat	2.9908	S	Kebonarum	3.5872	S	Trucuk	4.2246	S
15	Wonosari	2.8069	R	Wonosari	3.5628	S	Jogonalan	4.1778	R
16	Cawas	2.8051	R	Polanharjo	3.5591	S	Karangnongko	4.0293	R
17	Polanharjo	2.8027	R	Karanganom	3.4774	S	Polanharjo	4.0284	R
18	Karangdowo	2.7184	R	Kalikotes	3.4330	S	Tulung	3.9947	R
19	Karanganom	2.6974	R	Tulung	3.2114	R	Karangdowo	3.9737	R
20	Karangnongko	2.6502	R	Gantiwarno	3.1833	R	Jatinom	3.9368	R
21	Juwiring	2.6356	R	Cawas	3.1601	R	Kalikotes	3.8909	R
22	Gantiwarno	2.6135	R	Karangnongko	3.1163	R	Prambanan	3.8875	R
23	Manisrenggo	2.5823	R	Karangdowo	3.0285	R	Bayat	3.8805	R
24	Jatinom	2.5333	R	Bayat	2.9717	R	Wedi	3.8412	R

25	Prambanan	2.4039	R	Wedi	2.8966	R	Wonosari	3.8257	R
26	Wedi	2.0723	R	Prambanan	2.6755	R	Cawas	3.5607	R
	<b>Mean</b>	<b>3.5349</b>		<b>Mean</b>	<b>4.0738</b>		<b>Mean</b>	<b>4.7651</b>	
	<b>Std Deviasi</b>	<b>1.4301</b>		<b>Std Deviasi</b>	<b>1.4342</b>		<b>Std Deviasi</b>	<b>1.2708</b>	
	<b>Koef Var</b>	<b>40.46</b>		<b>Koef Var</b>	<b>35.21</b>		<b>Koef Var</b>	<b>26.67</b>	
	<b>Rendah</b>	<b>2.8198</b>		<b>Rendah</b>	<b>3.3567</b>		<b>Rendah</b>	<b>4.1297</b>	
	<b>Tinggi</b>	<b>4.2499</b>		<b>Tinggi</b>	<b>4.7909</b>		<b>Tinggi</b>	<b>5.4005</b>	
	<b>F Hitung</b>	<b>5,188</b>							
	<b>Probabilitas</b>	<b>0,008</b>							

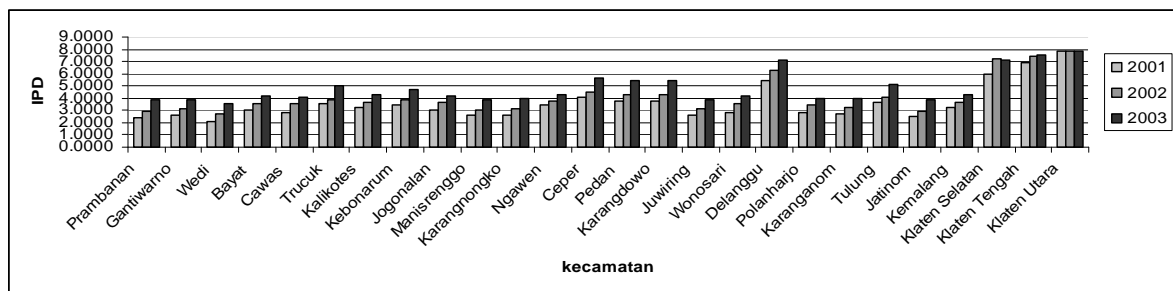
Sumber: Hasil Pengolahan data Sekunder

Berdasarkan tabel 4.29. dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) periode analisis, pada tahun 2001-2003 Kecamatan Klaten Utara memiliki IPD tertinggi sebesar 7,8190 dan 7,8854. sedangkan pada tahun 2002 nilai IPD terbesar yaitu Kecamatan Klaten Selatan dengan nilai IPD sebesar , 7,8019. Pada urutan kedua, yaitu Kecamatan Klaten Tengah pada tahun 2001 dengan nilai IPD 6,8930, sedangkan pada tahun 2002 Kecamatan Klaten Utara menempati urutan kedua dengan nilai IPD 7,4476. Pada tahun 2003 urutan kedua ditempati Kecamatan Klaten Selatan dengan Nilai IPD 7,8854 Nilai IPD terendah secara berturut-turut dari tahun 2001 yaitu Kecamatan Wedi sebesar 2,0723 sedangkan tahun 2002, yaitu Kecamatan Prambanan dengan nilai IPD 2,6755. Pada tahun 2003 nilai IPD terendah ditempati Kecamatan Cawas sebesar 3,5607. Kecamatan Karangmalang pada tahun 2001 dan 2003 memiliki urutan nilai IPD yang berada di pertengahan, tetapi pada tahun 2003 besarnya nilai IPD naik dan mendapatkan urutan di atas. Hal ini disebabkan besarnya nilai Indeks Kapabilitas Pemerintahan (IKP) pada sub kriteria alokasi dana kecamatan.

Perbandingan nilai IPD tahun 2001 dan tahun 2002 mengalami kenaikan yang meliputi sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Klaten Perbandingan IPD tahun 2001 dan 2002 diketahui setiap kecamatan

mengalami kenaikan nilai IPD kecuali, Kecamatan Tulung dan Bayat mengalami penurunan. Sedangkan perbandingan nilai IPD pada tahun 2002 dan 2003, adalah nilai IPD setiap kecamatan mengalami kenaikan.

Perbandingan nilai IPD dapat dilihat pada gambar 4.7.



**Gambar 4.7. Perbandingan nilai IPD di setiap kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2001, 2002 dan 2003.**

*Sumber : Hasil pengolahan data sekunder.*

Rata-rata (*mean*) Indeks Pembangunan Daerah Total selama 3 (tiga) tahun berturut-turut adalah sebesar 3,5349 pada tahun 2001; sebesar 4,0738 pada tahun 2002 dan sebesar 47651 pada tahun 2003. Standar deviasi Indeks Pembangunan Daerah Total-nya berturut-turut adalah sebesar 1,4301 pada tahun 2001; sebesar 1,4342 pada tahun 2002 dan sebesar 1,2708 pada tahun 2003. sedangkan nilai koefisien variasi IPD selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut yaitu, pada tahun 2001 40,46% kemudian 35,21% pada tahun 2002 dan 26,67% pada tahun 2003. Nilai koefisien variasi pada tahun 2001 adalah yang terbesar.

Penentuan kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2001 menunjukkan bahwa ada 4 (empat) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Selatan, dan Kecamatan Delanggu. Sedangkan Kecamatan yang masuk dalam kategori

rendah yaitu, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Cawas, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Karangnom, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Jatinom Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Wedi.

Kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2002 menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Selatan, dan Kecamatan Delanggu. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 8 (delapan) kecamatan, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Cawas, Kecamatan Tulung, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Bayat, Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Wedi.

Kategori Indeks Pembangunan Daerah Total menurut kecamatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Klaten Utara, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Ceper dan Kecamatan Delanggu. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah yaitu, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Cawas, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Tulung, Kecamatan Jatinom Kecamatan Prambanan, Kecamatan Bayat, Kecamatan Kalikotes dan Kecamatan Wedi.



Untuk pengujian apakah ada perbedaan nilai IPD selama periode tahun 2001, 2002 dan 2003, Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 5.188 dan probabilitasnya sebesar 0.008, maka  $H_0$  diterima. Berarti ketiga rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kabupaten Klaten selama 3 (tiga) tahun berturut-turut identik ataupun tidak mengalami perbedaan yang berarti.

### 3. Perbandingan Indeks Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota di Wilayah Subosuka Wonosraten tahun 2001-2003.

Setelah dilakukan analisis Indeks Pembangunan Daerah (IPD) setiap Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten pada 3 (tiga) periode yang berbeda, yaitu tahun 2000, 2001, dan tahun 2002, selanjutnya akan dibandingkan nilai IPD antar Kabupaten/ Kota selama pertahun dalam periode 2001, 2002 dan 2003.

Tabel 4.30. IPD Total rata-rata Kabupaten/Kota Subosuka Wonosraten Tahun 2001-2003

Tahun	IPD Kabupaten/Kota						
	Surakarta	Boyolali	Sukiharjo	Karanganyar	Wonogiri	Sragen	Klaten
2001	2,3131	1,6208	1,1150	3,3509	2,1539	1,8897	3,5349
2002	2,3456	1,8449	0,8449	1,8290	2,1138	1,9376	4,0738
2003	2,3755	1,8788	0,8683	3,7018	2,9485	1,9645	4,7651
<b>Mean</b>	<b>2.3447</b>	<b>1.7848</b>	<b>0.9427</b>	<b>2.9819</b>	<b>2.4054</b>	<b>1.9306</b>	<b>4.1246</b>
<b>Std dev</b>	<b>0.0312</b>	<b>0.1345</b>	<b>0.1496</b>	<b>0.9593</b>	<b>0.4708</b>	<b>0.0379</b>	<b>0.6167</b>
<b>Koef Var</b>	<b>1.33</b>	<b>7.53</b>	<b>15.87</b>	<b>32.17</b>	<b>19.57</b>	<b>1.96</b>	<b>14.95</b>
<b>F Hitung (dae)</b>	<b>40,954</b>						
<b>Prob</b>	<b>0,000</b>						
<b>F Hitung (th)</b>	<b>0,441</b>						
<b>Prob</b>	<b>0,669</b>						

Rata-rata (*mean*) Indeks Pembangunan Daerah Total selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut Kota Surakarta sebesar 2.3477, Kabupaten Boyolali sebesar 1,7848, Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,9427, Kabupaten Karanganyar sebesar

Sumber: Hasil Pengolahan data sekunder



2,9819, Kabupaten Wonogiri sebesar 2,4054, Kabupaten Sragen sebesar 1,9306 dan Kabupaten Klaten sebesar 4,1246. Standar deviasi Indeks Pembangunan Daerah Total-nya berturut-turut adalah Kota Surakarta sebesar 0,0312, Kabupaten Boyolali sebesar 0,1345, Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,1496, Kabupaten Karanganyar sebesar 0,9593, Kabupaten Wonogiri sebesar 0,4708, Kabupaten Sragen sebesar 0,0379 dan Kabupaten Klaten sebesar 0,1617. Sedangkan nilai koefisien variasi IPD selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut yaitu, Kota Surakarta sebesar 1,33%, Kabupaten Boyolali sebesar 7,53%, Kabupaten Sukoharjo sebesar 15,87%, Kabupaten Karanganyar sebesar 32,17%, Kabupaten Wonogiri sebesar 19,57%, Kabupaten Sragen sebesar 1,96% dan Kabupaten Klaten sebesar 14,95%

Untuk pengujian apakah ada perbedaan nilai IPD pada setiap kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten maupun ada tidaknya perbedaan rata-rata nilai IPD setiap Kabupaten/Kota pada tahun 2001, 2002 dan 2003, diuji menggunakan ANOVA. Hasil uji F terhadap ada tidaknya perbedaan rata-rata nilai IPD setiap Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten menunjukkan nilai F hitung sebesar 40,954 dan probabilitasnya sebesar 0.000, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Berarti rata-rata nilai populasi IPD untuk setiap Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten tidak identik ataupun mengalami perbedaan yang berarti. Sedangkan hasil uji F terhadap ada tidaknya perbedaan rata-rata nilai IPD di setiap Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten selama periode 3 (tahun) 2001, 2002 dan 2003 menunjukkan nilai F hitung sebesar 0,441 dan probabilitasnya sebesar 0,669, maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ . Berarti rata-rata nilai IPD setiap Kabupaten/kota di Subosuka Wonosraten

identik ataupun tidak mengalami perbedaan. Hal ini di sebabkan karena perubahan rata-rata nilai IPD Kabupaten/Kota setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang berarti, atau dengan kata lain pembangunan daerah belum menunjukkan perubahan yang berarti. Penyebab dari keidentikan nilai rata-rata IPD pada 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu tidak terdapat standarisasi ketersediaan data-data penunjang dalam penyusunan dan penghitungan Indeks Pembangunan Daerah (IPD) untuk setiap Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten sehingga ada beberapa data yang tidak tersedia.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil Penyusunan dan Penghitungan Indeks Pembangunan Daerah Sebagai Tolok Ukur Kemajuan Daerah (Studi Kasus Wilayah Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah), maka penelitian ini dapat dibuat kesimpulan-kesimpulan dan sara-saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya,

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil Penghitungan nilai Indeks Pembangunan Daerah di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten selama 3 (tiga) tahun yaitu 2001, 2002, dan 2003 dapat diketahui peringkat IPD-nya sebagai berikut:

a. Kota Surakarta

Kota Surakarta pada tahun 2001, 2002, dan 2003 menunjukkan bahwa ada 4 (empat) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Serengan, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon. Kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 1 (satu) kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarsari.

b. Kabupaten Boyolali

Kecamatan Boyolali memiliki IPD tertinggi pada tahun 2002, 2002 dan 2003. Pada urutan kedua setelah Kecamatan Boyolali, yaitu Kecamatan Selo pada tahun 2001 dan 2002, pada tahun 2003 urutan kedua ditempati Kecamatan Teras sedangkan Kecamatan Selo turun di urutan 8. Nilai IPD terendah secara berturut-turut dari tahun 2001, 2002 dan 2003 yaitu Kecamatan Sawit.

c. Kecamatan Sukoharjo

Pada tahun 2001, 2002 dan 2003 Kecamatan Sukoharjo memiliki IPD tertinggi. Pada urutan kedua setelah Kecamatan Sukoharjo, yaitu Kecamatan Bulu pada tahun 2001 dengan, sedangkan pada tahun 2002 Kecamatan Bendosari menempati urutan kedua. Pada tahun 2003 urutan kedua ditempati Kecamatan Kartasura. Nilai IPD terendah secara berturut-turut dari tahun 2001 yaitu Kecamatan Grogol, sedangkan tahun 2002, yaitu Kecamatan Baki dan pada tahun 2003 nilai IPD terendah ditempati Kecamatan Gatak.

d. Kecamatan Karanganyar

Pada tahun 2001 dan 2003 Kecamatan Jaten memiliki IPD tertinggi selanjutnya pada tahun 2002, nilai IPD terbesar adalah Kecamatan

Karanganyar. Pada urutan kedua, yaitu Kecamatan Karanganyar pada tahun 2001 dan 2003, sedangkan pada tahun 2002 Kecamatan Colomadu menempati urutan kedua. Nilai IPD terendah secara berturut-turut dari tahun 2001 dan 2003 yaitu Kecamatan Kerjo sedangkan tahun 2002, yaitu Kecamatan Jumapolo.

e. Kabupaten Wonogiri

Pada tahun 2001, 2002 dan 2003 Kecamatan Wonogiri memiliki IPD tertinggi. Pada urutan kedua, yaitu Kecamatan Paranggupito pada tahun 2001, sedangkan pada tahun 2002 Kecamatan Puhpelem menempati urutan kedua. Pada tahun 2003 urutan kedua ditempati Kecamatan Karangtengah. Nilai IPD terendah secara berturut-turut dari tahun 2001 yaitu Kecamatan Eromoko sedangkan tahun 2002, yaitu Kecamatan Selogiri dan tahun 2003 adalah Kecamatan Tirtomoyo.

f. Kabupaten Sragen

Pada tahun 2001, 2002 dan 2003 Kecamatan Sragen memiliki IPD tertinggi. Pada urutan kedua, yaitu Kecamatan Jenar pada tahun 2001, sedangkan pada tahun 2002 Kecamatan Karangmalang menempati urutan kedua Pada tahun 2003 urutan kedua ditempati Kecamatan Karangmalang. Nilai IPD terendah secara berturut-turut dari tahun 2001 dan 2002 yaitu Kecamatan Gemolong sedangkan pada tahun 2003 nilai IPD terendah ditempati Kecamatan Plupuh.

g. Kabupaten Klaten

Pada tahun 2001 dan 2003 Kecamatan Klaten Utara memiliki IPD tertinggi, sedangkan pada tahun 2002 nilai IPD terbesar yaitu Kecamatan

Klaten Selatan. Pada urutan kedua, yaitu Kecamatan Klaten Tengah pada tahun 2001, sedangkan pada tahun 2002 Kecamatan Klaten Utara menempati urutan kedua. Pada tahun 2003 urutan kedua ditempati Kecamatan Klaten Selatan. Nilai IPD terendah secara berturut-turut dari tahun 2001 yaitu Kecamatan Wedi sedangkan tahun 2002, yaitu Kecamatan Prambanan dan pada tahun 2003 nilai IPD terendah ditempati Kecamatan Cawas

2. Dari hasil Penghitungan nilai Indeks Pembangunan Daerah di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten selama 3 (tiga) tahun yaitu 2001, 2002, dan 2003 dapat diketahui kategori kecamatan dengan nilai IPD tinggi, sedang dan rendah sebagai berikut:

a. Kota Surakarta

Kecamatan Serengan memiliki nilai IPD tertinggi pada tahun 2001, 2002 dan tahun 2003. Kecamatan yang memiliki urutan kedua setelah Kecamatan Serengan, yaitu Kecamatan Jebres pada tahun 2001 dan kemudian digantikan oleh Kecamatan Pasar Kliwon pada tahun 2002 dan pada tahun 2003 urutan kedua adalah Kecamatan Laweyan. Kecamatan Banjarsari dalam periode 2001, 2002, dan 2003 menempati urutan terbawah untuk nilai IPD-nya.

b. Kabupaten Boyolali

Pada tahun 2001, 2002, dan 2003 menunjukkan bahwa ada 2 (dua) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Ampel, Kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 15 (lima belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Juwangi, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Selo, Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Ampel, Kecamatan Musuk, Kecamatan Teras, Kecamatan Cepogo, Kecamatan

Karanggede, Kecamatan Banyudono, , Kecamatan Simo, Kecamatan Klego, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Andong, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Sambu, dan Kecamatan Mojosongo. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 1 (satu) kecamatan, yaitu Kecamatan Sawit.

c. Kecamatan Sukoharjo

Pada tahun 2001, 2002 dan 2003 menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Bulu. Kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Tawanghari, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Nguter, dan Kecamatan Weru. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Mojolaban.

d. Kecamatan Karanganyar

Pada tahun 2001, 2002 dan 2003 menunjukkan bahwa terdapat 4(empat) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Kebakkramat dan Kecamatan Jaten. Kecamatan yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 6(enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan Jumantono. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 6(enam) kecamatan, yaitu

Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Tasikmadu,  
Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Kerjo. .

e. Kabupaten Wonogiri

Pada tahun 2001, 2002 dan 2003 Kategori Indeks Pembangunan Daerah

Total menurut kecamatan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat 7(tujuh) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Wuryantoro, Kecamatan Paranggupito, Kecamatan Baturetno, Kecamatan Batuwarno, dan Kecamatan Eromoko. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Puhpelem, Kecamatan Giriwoyo, Kecamatan Manyaran, Kecamatan Girimarto, Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Slogohimo, Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Pracimantoro, dan Kecamatan Tirtomoyo.

f. Kabupaten Sragen

Pada tahun 2001, 2002 dan 2003 Kategori Indeks Pembangunan Daerah

Total menurut kecamatan di Kabupaten Sragen pada tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Sragen, Kecamatan Jenar, Kecamatan Nrapal, dan Kecamatan Karangmalang. Sedangkan kecamatan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoharjo, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Gemolong, dan Kecamatan Plupuh.



g. Kabupaten Klaten

Pada tahun 200, 2002 dan 2003 menunjukkan bahwa ada 4 (empat) kecamatan yang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Tengah, Kecamatan Klaten Selatan, dan Kecamatan Delanggu. Sedangkan Kecamatan yang masuk dalam kategori rendah yaitu, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Cawas, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Juwiring, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Jatinom Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Wedi.

Dari hasil pengujian terhadap nilai Indeks Pembangunan Daerah di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten selama 3 (tiga) tahun yaitu 2001, 2002, dan 2003 dapat diketahui bahwa rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kota Surakarta selama 3 (tiga) tahun berturut-turut identik ataupun tidak mengalami perbedaan yang berarti. Rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kabupaten Boyolali selama 3 (tiga) tahun berturut-turut identik ataupun tidak mengalami perbedaan yang berarti. Rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak identik ataupun mengalami perbedaan yang berarti. rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak identik ataupun mengalami perbedaan yang berarti. Rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kabupaten Wonogiri selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak identik ataupun mengalami perbedaan yang berarti. Rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sragen selama 3



(tiga ) tahun berturut-turut identik ataupun tidak mengalami perbedaan yang berarti. Rata-rata populasi nilai IPD untuk setiap kecamatan di Kabupaten Klaten selama 3 (tiga ) tahun berturut-turut identik ataupun tidak mengalami perbedaan yang berarti.

3. Dari hasil pengujian terhadap nilai Indeks Pembangunan Daerah di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten Rata-rata nilai populasi IPD untuk setiap Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten tidak identik ataupun mengalami perbedaan yang berarti. Sedangkan pengujian IPD setiap Kabupaten/Kota di Subosuka Wonosraten terhadap periode waktu selama 3 tahun yaitu 2001, 2002 dan 2003 menunjukkan bahwa rata-rata nilai IPD-nya identik ataupun tidak mengalami perbedaan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diambil dari serangkaian studi yang terkait dengan Penyusunan dan Penghitungan Indeks Pembangunan Daerah di setiap Kabupaten/kota di Wilayah Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah, yaitu tahun 2002, 2002, dan 2003, adalah sebagai berikut:

1. Dengan telah disusunnya IPD di setiap kecamatan di Kabupaten/kota Wilayah Subosuka Wonosraten tahun 2001, 2002, dan 2003; hasilnya dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan di dalam mengelola pemerintahan di tingkat kecamatan. IPD (Indeks Pembangunan Daerah) yang tinggi mencerminkan bahwa pengelolaan kepernerintahan di daerah/wilayah/kecamatan yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding dengan daerah/wilayah/kecamatan yang lain

2. Dengan melihat berbagai indikator data yang digunakan dalam penyusunan indeks ini, maka daerah/wilayah/kecamatan memperbaiki basis data yang selama ini telah dan sedang didokumentasikan dalam bentuk Monografi Kecamatan, selanjutnya mengevaluasi tingkat keakuratan datanya sekaligus mengembangkan data yang selama ini belum didokumentasikan dan diperlukan sebagai penunjang pembentukan indeks. Suatu daerah/wilayah/kecamatan yang kebetulan mempunyai peringkat (*rating*) yang rendah harus mawas diri dan dilanjutkan dengan terus mengupayakan peningkatan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah /wilayah/kecamatan.
3. Dengan melihat dan memperbandingkan nilai IPD baik antar waktu maupun antar daerah/wilayah/kecamatan di Kabupaten/kota Wilayah Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah dapat diketahui sejauh mana program-program pembangunan yang lebih tinggi di tingkat kabupaten berpengaruh terhadap kinerja di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, yang dalam hal ini adalah kinerja pembangunan di tingkat kecamatan. Hasil evaluasi atas kinerja pembangunan di tingkat kecamatan dapat dijadikan sebagai bahan untuk perencanaan di masa-masa mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. **Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah**. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Temenggung, Yuswandi, dan Ahmad kamil. 2001. **Pemanfaatan Data Spasial Sosial ekonomi dalam Rangka Mendukung Otonomi Daerah (On-line)**.  
[.http://www.google.com](http://www.google.com)
- Bapeda Kabupaten Klaten dan Lembaga Penelitian UNS. 2003. **Indeks Pembangunan Daerah (Regional Development Index) Kabupaten Klaten**. Klaten: Bapeda.

- BPS dan Bappeda Propinsi Jawa Tengah. **Jawa Tengah Dalam Angka (beberapa terbitan)**. Propinsi Jawa Tengah : BPS dan Bappeda.
- BPS dan Bappeda Kota Surakarta. **Surakarta Dalam Angka (beberapa terbitan)**. Surakarta : BPS dan Bappeda.
- BPS dan Bappeda Kabupaten Boyolali.. **Boyolali Dalam Angka (beberapa terbitan)**. Boyolali : BPS dan Bappeda..
- BPS dan Bappeda Kabupaten Sukoharjo. **Sukoharjo Dalam Angka (beberapa terbitan)**. Sukoharjo : BPS dan Bappeda.
- BPS dan Bappeda Kabupaten Karanganyar. **Karanganyar Dalam Angka (beberapa terbitan)**. Karanganyar : BPS dan Bappeda.
- BPS dan Bappeda Kabupaten Wonogiri.). **Wonogiri Dalam Angka (beberapa terbitan)**. Wonogiri : BPS dan Bappeda.
- BPS dan Bappeda Kabupaten Sragen.. **Sragen Dalam Angka (beberapa terbitan)**. Sragen : BPS dan Bappeda.
- BPS dan Bappeda Kabupaten Klaten. **Klaten Dalam Angka (beberapa terbitan)**. Klaten : BPS dan Bappeda.
- Djarwanto PS. 1993. **Statistik Induktif**. Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit BPFE-UGM.
- Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. 2003. **Buku Pedoman Penulisan Skripsi**. Surakarta: FE UNS.
- Irawan Kadiman. (2001). **Konsep dan Indikator Pembangunan**. Bahan Ajar Diklatpim. Tingkat IV. Jakarta. LP FE UI dan LPEM FE UI.
- Mulyanto. 2002. **Analisis Realisasi dan Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta Kapasitas Pinjaman Daerah (Studi Kasus di Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah)**. Laporan Penelitian (tidak diterbitkan) Kerjasama Pusat Pengkajian dan Pelatihan Ekonomi UNS dengan IRIS Center, Maryland University.
- Mulyanto. 2003. **Identifikasi dan Analisis Sektor Ekonomi Unggulan di Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN Propinsi Jawa Tengah**. Usul Penelitian dosen muda. Surakarta: FE UNS.
- Mulyanto. 2004(a). **Pembangunan Daerah dan Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah di Era Otonomi**. Suplement Mata Kuliah Ekonomi Regional. Surakarta.
- Mulyanto. 2004(b). **Pengembangan dan Pengukuran Indiaktor Kemajuan Pembangunan Di era Otonomi dan Desentralisasi**. Usul Penelitian Dosen Muda Surakarta: FE UNS.
- Republik Indonesia. 1999. **GBHN 1999-2004 beserta UUD Tahun 1945 dengan penjelasannya**. Surabaya: Apollo.
- Sudantoko, Djoko. 2003. **Dilema Otonomi Daerah**. Yogyakarta: ANDI.
- Suryana. 2000. **Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan**. Jakarta: Salemba Empat.

Todaro, Michael P. 2000. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Edisi Ketujuh. Jakarta. Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

